



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
KPKNL Serang
2025

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Daftar Tabel	5
Daftar Gambar	6
Daftar Grafik	7
Sambutan Kepala KPKNL Serang	9
BAB 1 PENDAHULUAN.....	11
A. Latar Belakang	13
B. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi	14
C. Mandat Dan Peran Strategis	18
D. Program Reformasi Birokrasi Dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2025. 22	
E. Sistematika	23
BAB II. RENCANA KINERJA.....	25
A. Rencana Strategis	27
B. Prioritas Nasional dan Penyusunan Renja Tahun 2025 dan Tahun 2026	32
C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025	34
D. Refinement Kinerja dan Risiko Tahun 2025 dan Tahun 2026	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	45
A. Capaian Kinerja Organisasi	47
B. Realisasi Kinerja Prioritas.....	79
C. Realisasi Anggaran	81
D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	83
E. Kinerja Lain-lain	84
F. Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	87
BAB IV PENUTUP	88
LAMPIRAN	92

Daftar Tabel

1.	Tabel 1	Penetapan Kinerja Berdasarkan Peta Strategi Tahun 2025	35
2.	Tabel 2	DIPA KPKNL Serang	38
3.	Tabel 3	Daftar Resiko KPKNL Serang Tahun 2025	41
4.	Tabel 4	Daftar Resiko KPKNL Serang Tahun 2026	42
5.	Tabel 5	Capaian Kinerja Tahun 2025	48
6.	Tabel 6	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	50
7.	Tabel 7	Indeks Integritas.....	51
8.	Tabel 8	Perbandingan Indeks Integritas.....	51
9.	Tabel 9	Capaian IKU Persentase Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang	52
10.	Tabel 10	Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang	53
11.	Tabel 11	Perbandingan Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	54
12.	Tabel 12	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	55
13.	Tabel 13	Capaian IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara.....	56
14.	Tabel 14	Capaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang	57
15.	Tabel 15	Perbandingan Perbandingan Persentase Realisasi Pokok Lelang.....	58
16.	Tabel 16	Capaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang	58
17.	Tabel 17	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	59
18.	Tabel 18	Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	60
19.	Tabel 19	Indeks kepuasan pengguna layanan	60
20.	Tabel 20	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi.....	61
21.	Tabel 21	Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	62
22.	Tabel 22	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	63
23.	Tabel 23	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	64
24.	Tabel 24	Capaian IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	65
25.	Tabel 25	Perbandingan IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	66
26.	Tabel 26	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang Yang Profesional dan Produktif	66
27.	Tabel 27	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	67
28.	Tabel 28	Perbandingan Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	68
29.	Tabel 29	Tingkat kualitas layanan penilaian	68
30.	Tabel 30	Persentase produktivitas lelang	69
31.	Tabel 31	Komponen Persentase produktivitas lelang	70
32.	Tabel 32	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	71
33.	Tabel 33	Indeks kualitas kinerja anggaran	71
34.	Tabel 34	Indeks kualitas kinerja anggaran	72
35.	Tabel 35	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	72
36.	Tabel 36	Persentase pengembangan kompetensi pegawai.....	73
37.	Tabel 37	Perbandingan Persentase pengembangan kompetensi pegawai.....	74
38.	Tabel 38	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	75
39.	Tabel 39	Indeks penanganan permasalahan hukum.....	75
40.	Tabel 40	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	76
41.	Tabel 41	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	77
42.	Tabel 42	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	77
43.	Tabel 43	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	78
44.	Tabel 44	Capaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Serang	81
45.	Tabel 45	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	83
46.	Tabel 46	Apresiasi	85

Daftar Gambar

1. Gambar 1 Wilayah Kerja KPKNL Serang	15
2. Gambar 2 Struktur Organisasi Menurut PMK 154/PMK.01/2021	15
3. Gambar 3 Struktur Organisasi KPKNL Serang	16
4. Gambar 4 Tabel Peta Strategis KPKNL Serang	30
5. Gambar 5 Piagam Apresiasi KPKNL Serang Tahun 2025	8630

Daftar Grafik

1. Grafik 1 Komposisi SDM KPKNL Serang berdasar Golongan	17
2. Grafik 2 Penerimaan Negara Bukan Pajak	79
3. Grafik 3 Indeks Kepuasan Pengguna Layan	87
4. Grafik 4 Nilai Capaian Kinerja Organisasi	87



Swastiko Purnomo

Kepala KPKNL Serang

Sambutan

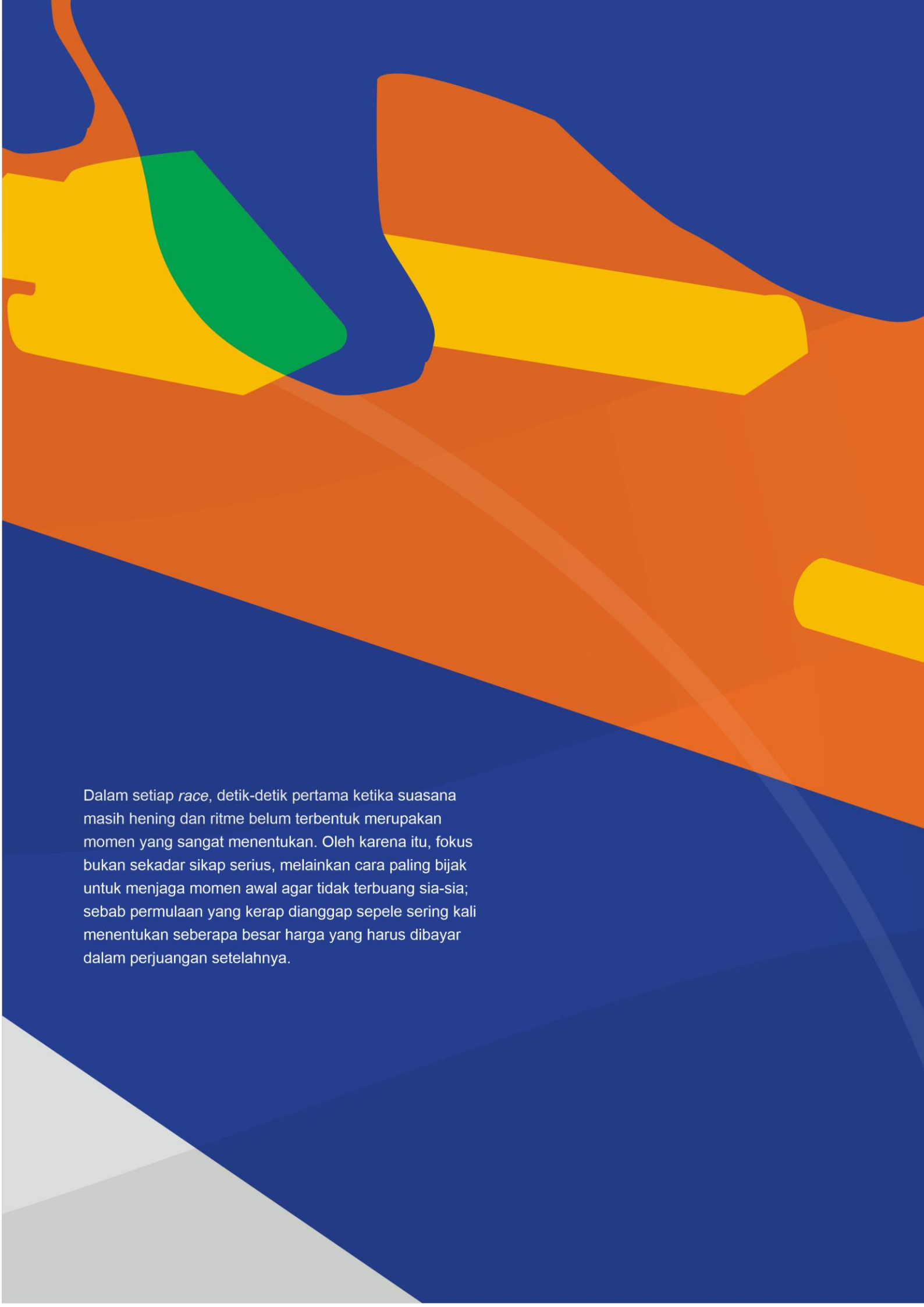
Kepala KPKNL Serang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja.

Berpedoman pada peraturan tersebut, KPKNL Serang telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Laporan capaian kinerja tahun 2025 KPKNL Serang menyajikan hasil pencapaian terhadap 8 (delapan) Sasaran Strategis *Kemenkeu Three* KPKNL dengan 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja Utama, yang berhasil mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025 sebesar 116,25% beserta hasil analisa atas capaian tersebut.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disusun dengan harapan agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan, sekaligus merupakan pertanggungjawaban atas upaya pencapaian tujuan/sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada KPKNL Serang.

The background features a dynamic composition of overlapping geometric shapes in shades of blue, orange, and yellow. The shapes are layered, creating a sense of depth and movement. A prominent diagonal line separates a darker blue area at the bottom from a lighter blue area at the top. The overall aesthetic is modern and energetic.

Dalam setiap *race*, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbang sia-sia; sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.

An illustration of two hands in blue, one holding a yellow scroll with a green band and a white pentagon. The background is orange with a blue diagonal stripe at the bottom.

01.

Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Mandat dan Peran Strategis
- D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2025
- E. Sistematika



A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN beserta unit vertikal dibawahnya dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap

kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung-jawaban KPKNL Serang dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang merupakan unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016. Dalam perkembangannya, pada tanggal 28 Oktober 2021 telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang mencabut kedua Peraturan Menteri Keuangan terdahulu. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 29 Oktober 2021.

Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, KPKNL

menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

1. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. pelaksanaan pelayanan lelang;
7. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
8. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. pelaksanaan administrasi KPKNL.

Gambar 1 Wilayah Kerja KPKNL Serang



Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021, wilayah kerja KPKNL Serang meliputi Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak.

KPKNL dipimpin oleh Kepala kantor yang merupakan pejabat eselon III, dan terdiri dari 5 (lima) seksi/subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut:

1. Subbagian Umum;
2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
3. Seksi Piutang Negara;
4. Seksi Hukum dan Informasi;
5. Seksi Kepatuhan Internal; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi pada KPKNL menurut Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 serta struktur organisasi pada KPKNL Serang:

Gambar 2 Struktur Organisasi Menurut PMK 154/PMK.01/2021



Gambar 3 Struktur Organisasi KPKNL Serang

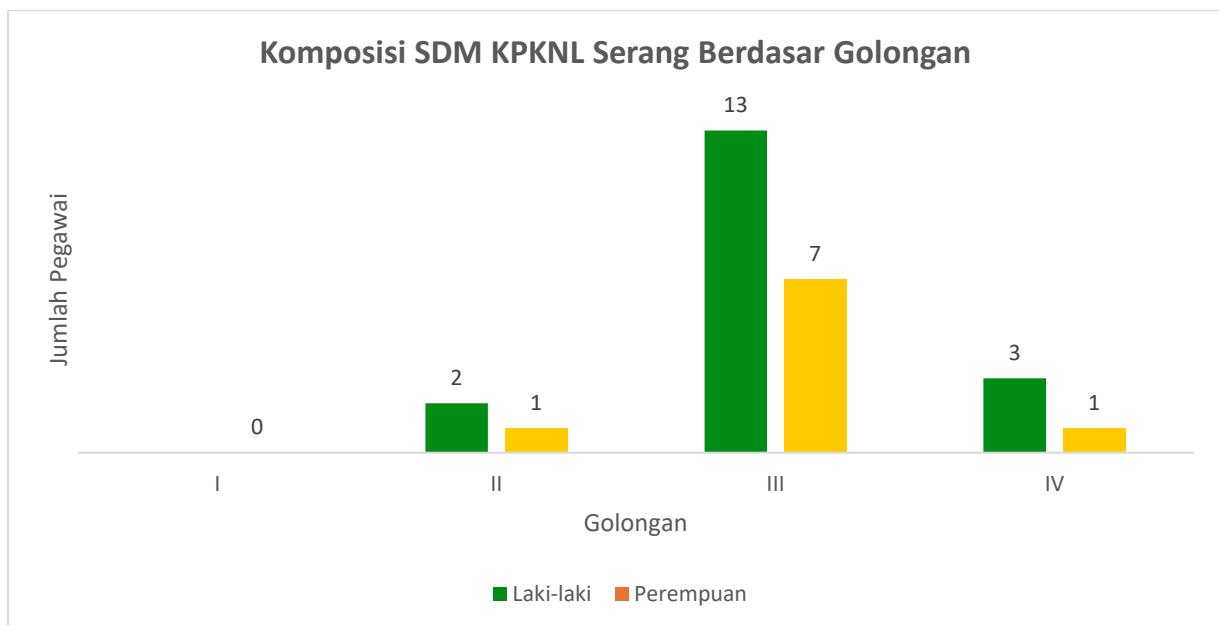


Pada Tahun 2025 untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPKNL Serang dilaksanakan oleh 27 (dua puluh tujuh) orang pegawai.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Serang senantiasa

memegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan. Di samping itu, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada *stakeholder*, KPKNL Serang memiliki motto, yaitu **Profesional, Responsif gender, Integritas, Melayani, dan Akuntabel** yang disingkat **PRIMA** .

Grafik 1 Komposisi SDM KPKNL Serang berdasar Golongan



C. Mandat Dan Peran Strategis

Sebagai organisasi yang memiliki tugas memberikan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang, KPKNL Serang memiliki peran strategis sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara.

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Serang turut berperan dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara yang difokuskan pada upaya pemanfaatan kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara dan penatausahaan kekayaan negara. KPKNL Serang selaku *asset manager* juga mengemban tugas menata manajemen aset negara dan

menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam rangka peningkatan pendapatan negara berupa PNBPN dan penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

2. Penilaian

Sebagai bagian dari transformasi yang terjadi pada DJKN, Seksi Pelayanan Penilaian pada akhir tahun 2021 mengalami peleburan menjadi Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu Penilai Pemerintah Ahli Muda dan Penilai Pemerintah Ahli Pertama. Penilaian terhadap kekayaan negara merupakan bagian dari proses pengelolaan kekayaan negara. Proses penilaian dilakukan setelah adanya analisis oleh pengelola barang yang bertujuan untuk menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Kegiatan penilaian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dan nilai sewa wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan barang milik negara lainnya yang berada pada lingkup Kementerian/Lembaga Negara. Di sisi lain, nilai pasar dan nilai likuidasi dilakukan terhadap objek penilaian yang merupakan barang

jaminan proses pengurusan piutang negara oleh PUPN.

Hasil penilaian barang milik negara tersebut akan digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara, dan pengurusan piutang negara. Dengan demikian hasil penilaian dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *The Highest and Best Use*.

3. Pengurusan Piutang Negara

Seksi Piutang Negara mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara. Pengurusan Piutang Negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan - badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan,

dan sebab apapun. Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012, piutang macet yang berasal dari BUMN perbankan, pengurusannya tidak lagi diserahkan kepada PUPN, sehingga fokus pengurusan dilakukan terhadap piutang negara yang telah diserahkan dan piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah. Selain itu, juga terdapat penyerahan piutang negara dari sejumlah Obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS), aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) dan BPPN yang permasalahannya sangat kompleks.

Pada tahun 2022 telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Tujuan ditetapkannya peraturan tersebut adalah untuk mendorong terciptanya mekanisme penghapusan Piutang Daerah yang pruden dan akuntabel serta mengatur kembali level of playing field antara PUPN dan Pemda dalam menyelesaikan piutangnya (piutang daerah s.d Rp8 juta akan diselesaikan sendiri oleh Pemda).

4. Pelayanan Lelang

Seperti Seksi Pelayanan Penilaian, pada akhir tahun 2021 Seksi Pelayanan Lelang pun bertransformasi menjadi Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari Pelalang Ahli Madya, Pelelang Ahli Muda dan Pelelang Ahli Pertama. Pelayanan lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai sarana transaksi penjualan aset secara umum, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN.

Lelang mempunyai manfaat nilai lebih dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, efisien, dan dapat lebih menjamin kepastian hukum. Risalah Lelang yang merupakan akta otentik berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Serang diharapkan menjadi akselerator agar paradigma lelang meresap kedalam *mindset* masyarakat, sehingga memandang lelang seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, DJKN melakukan inovasi dalam pelayanan lelang dengan

pelaksanaan lelang melalui internet (e-auction). Sebagai pedoman pelaksanaan e-auction telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2023. Sesuai peraturan ini, e-auction dapat digunakan untuk lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib, maupun lelang noneksekusi sukarela. Salah satu keunggulan e-auction adalah pelaksanaan lelang menjadi lebih praktis, karena peminat lelang dapat menawar dari mana saja, tanpa perlu hadir langsung. Lelang e-auction dapat diakses melalui laman lelang.go.id atau dari smartphone berbasis Android melalui aplikasi Lelang Indonesia.

Perkembangan teknologi digital terus mengalami kemajuan pesat. Dalam rangka mendukung inovasi dan modernisasi pelayanan, KPKNL Serang, sebagai salah satu kantor vertikal di bawah naungan Kanwil DJKN Banten, telah ditunjuk sebagai kantor piloting untuk implementasi Aplikasi Portal Lelang Indonesia versi 2.

Penunjukan ini mencakup pelaksanaan layanan untuk seluruh jenis lelang, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Melalui aplikasi Portal Lelang V2, KPKNL Serang berkomitmen

memberikan layanan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna jasa lelang, sejalan dengan perkembangan era digital.

5. Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan Barang Milik Negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.

Sebagai *supporting unit* Subbagian Umum memegang peranan penting terciptanya pelayanan yang memadai kepada para pengguna jasa. Pada tahun 2025, Subbagian Umum menjalankan pengeluaran operasional rutin dan non operasional untuk pelayanan kepada pengguna jasa melalui seksi teknis. Subbagian Umum juga melakukan manajemen SDM pada KPKNL Serang dengan melakukan pemetaan SDM dan menempatkannya sesuai dengan kompetensinya. Selain itu, Subbagian Umum juga melakukan

penatausahaan atas BMN yang tercatat dalam daftar barang KPKNL Serang.

6. Hukum dan Informasi

Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

7. Kepatuhan Internal

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

Strategic Issued

Strategic issued atau permasalahan utama yang sedang dihadapi KPKNL Serang, dapat mempengaruhi pencapaian kinerja pada tahun 2025 antara lain sebagai berikut.

1. Upaya pemanfaatan kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara dan penatausahaan kekayaan negara yang masih tersebar dan dalam jumlah yang banyak pada Satuan Kerja di Wilayah Banten.
2. Penyerahan piutang negara dari sejumlah Obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS), aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) dan BPPN yang permasalahannya sangat kompleks.
3. Implementasi peralihan aplikasi, dari Aplikasi Portal Indonesia Versi 1 ke Aplikasi Portal Lelang Indonesia versi 2.
4. Peleburan dan delayering pada Seksi Pelayanan Penilaian pada akhir tahun 2021 menjadi Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu Penilai Pemerintah Ahli Muda dan Penilai Pemerintah Ahli Pertama.

D. Program Reformasi Birokrasi Dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2025

Pada tahun 2025, KPKNL Serang ditetapkan sebagai salah satu Unit Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang melaksanakan Program Reformasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2025. Penetapan ini merupakan bentuk kepercayaan terhadap KPKNL Serang dalam menjaga keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya pada penguatan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

Dalam rangka pelaksanaan program tersebut, KPKNL Serang mengikuti Evaluasi Keberlanjutan WBK/WBBM Tahun 2025 yang bertujuan untuk menilai konsistensi penerapan nilai-nilai Kementerian Keuangan, efektivitas pengendalian internal, kualitas tata kelola organisasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara

berkelanjutan. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, antara lain manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, KPKNL Serang berhasil memperoleh nilai sebesar 93,43, yang menunjukkan tingkat kematangan reformasi birokrasi yang sangat baik. Capaian ini mencerminkan komitmen seluruh jajaran KPKNL Serang dalam

mempertahankan predikat WBK/WBBM melalui penerapan prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, serta orientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat.

Hasil evaluasi tersebut sekaligus menjadi dasar dan motivasi bagi KPKNL Serang untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan, memperkuat budaya organisasi yang berintegritas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada tahun-tahun berikutnya, sejalan dengan arah kebijakan reformasi dan transformasi Kementerian Keuangan

E. Sistematika


Untuk memudahkan dalam memahami isi laporan, maka digunakan sistematika pelaporan sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Perencanaan Kinerja
- BAB III Akuntabilitas Kinerja
- BAB IV Penutup

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan

dimaksud, selama tahun 2025 KPKNL Serang telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam Bab II Laporan ini.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja KPKNL Serang di tahun yang akan datang.



Kecepatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi



02.

Rencana Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Prioritas Nasional dan Penyusunan
- C. Renja Tahun 2025 dan tahun 2026
- D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun
Anggaran 2025
- E. Refinement Kinerja dan Risiko Tahun
2025 dan Tahun 2026



A. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis.

Dalam mengemban tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, KPKNL Serang mempunyai visi yang sama dengan DJKN yaitu “Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan”.

Untuk mencapai Visi tersebut, ditetapkan Misi KPKNL Serang sebagai berikut.

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk

mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.

4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut, KPKNL Serang menerapkan nilai-nilai Kemenkeu yang menjadi dasar dan fondasi bagi pimpinan dan seluruh pegawai Kemenkeu termasuk DJKN dalam mengabdikan, bekerja, dan bersikap untuk mendukung peningkatan kinerja institusi. Nilai-nilai Kemenkeu dimaksud ditetapkan dalam Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 312 Tahun 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Integritas

Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu melakukannya dengan baik dan

benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama integritas sebagai berikut:

- a. Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya; dan
- b. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

2. Profesionalisme

Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama profesionalisme sebagai berikut:

- a. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas; dan
- b. Bekerja dengan hati.

3. Sinergi

Dalam sinergi terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu memiliki komitmen untuk membangun dan

memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama sinergi sebagai berikut:

- a. Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati; dan
- b. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.

4. Pelayanan

Dalam pelayanan terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman. Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama pelayanan sebagai berikut:

- a. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan; dan
- b. Bersikap proaktif dan cepat tanggap.

5. Kesempurnaan

Dalam kesempurnaan terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama kesempurnaan sebagai berikut:

- a. Melakukan perbaikan terus menerus; dan
- b. Mengembangkan inovasi dan kreativitas.

Pada dasarnya sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara spesifik, dalam jangka pendek dan terukur. Adapun sasaran yang hendak dicapai KPKNL Serang untuk Tahun Anggaran 2025 meliputi:

- 1) Indeks Integritas
- 2) Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang
- 3) Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara
- 4) Persentase Realisasi Pokok Lelang
- 5) Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara
- 6) Indeks kepuasan pengguna layanan
- 7) Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi
- 8) Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan
- 9) Persentase evaluasi kinerja BMN
- 10) Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara
- 11) Tingkat kualitas layanan penilaian
- 12) Persentase produktivitas lelang
- 13) Indeks kualitas kinerja anggaran
- 14) Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa
- 15) Persentase pengembangan kompetensi pegawai
- 16) Indeks penanganan permasalahan hukum
- 17) Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)
- 18) Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko
- 19) Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap instansi diwajibkan untuk menyusun Kontrak Kinerja sebagai penjabaran operasional Rencana Strategis. Dalam Kontrak Kinerja, setiap rumusan sasaran strategis dilengkapi dengan rumusan indikator kinerja serta target kinerjanya.

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional serta visi dan misi Kemenkeu, ditetapkan Tujuan DJKN Tahun 2025-2029 yang dilengkapi

dengan indikator Tujuan sebagai berikut.

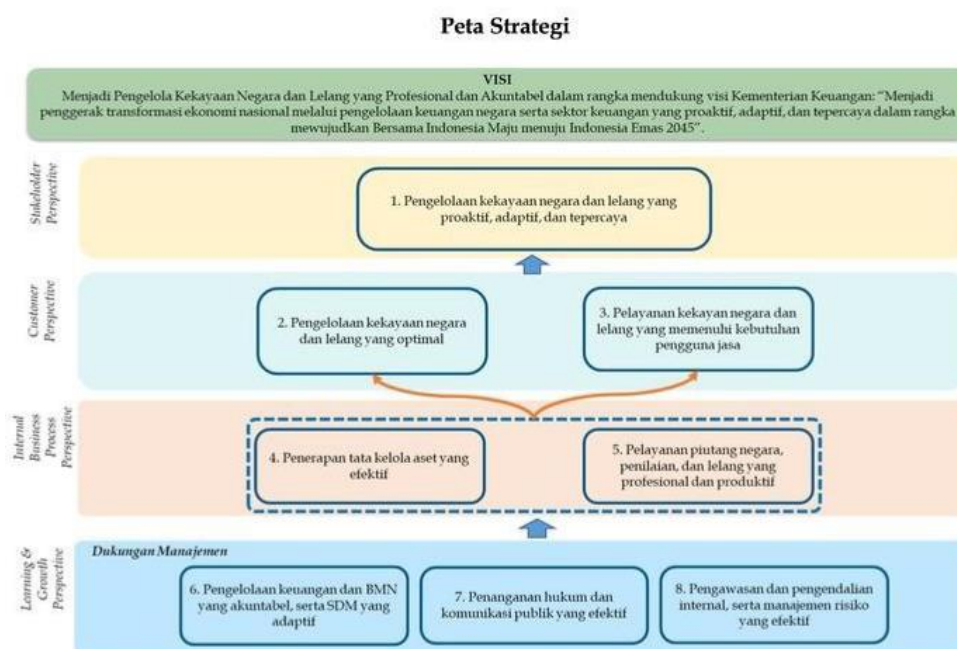
1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Aset.
2. Layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Tingkat Kualitas Layanan Penilaian.
3. Layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan

indikator Persentase Realisasi Pokok Lelang.

4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Dalam hal ini, peta strategi Kemenkeu Three KPKNL Serang tahun 2025 mempunyai 4 (empat) perspektif, yaitu: *Stakeholders Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Business Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. Keempat perspektif tersebut kemudian diuraikan kedalam 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dengan peta strategis sebagai berikut:

Gambar 4 Tabel Peta Strategis KPKNL Serang



Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap instansi diwajibkan untuk menyusun Kontrak Kinerja sebagai penjabaran operasional Rencana Strategis. Dalam Kontrak Kinerja, setiap rumusan sasaran strategis dilengkapi dengan rumusan indikator kinerja serta target kinerjanya.

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional serta visi dan misi Kemenkeu, ditetapkan Tujuan DJKN Tahun 2025-2029 yang dilengkapi dengan indikator Tujuan sebagai berikut.

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Aset.
2. Layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan

indikator Tingkat Kualitas Layanan Penilaian.

3. Layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Persentase Realisasi Pokok Lelang.
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Dalam hal ini, peta strategi Kemenkeu Three KPKNL Serang tahun 2025 mempunyai 4 (empat) perspektif, yaitu: *Stakeholders Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. Keempat perspektif tersebut kemudian diuraikan kedalam 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dengan peta strategis sebagai berikut:

B. Prioritas Nasional dan Penyusunan Renja Tahun 2025 dan Tahun 2026

KPKNL Serang dalam mengemban tugas dan fungsi yang telah ditetapkan tentunya sejalan dengan DJKN untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional melalui pelaksanaan berbagai strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi DJKN. Adapun rincian keterlibatan DJKN pada Prioritas Nasional adalah sebagai berikut. **Prioritas Nasional 2 :**

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Pada Prioritas Nasional 2, DJKN diamanatkan untuk berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan (Program Prioritas) pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem, spesies, dan genetik, yang dilaksanakan melalui strategi (Kegiatan Prioritas) penguatan tata kelola keanekaragaman hayati dan penguatan instrumen pencegahan dampak lingkungan hidup. Dalam rangka implementasi strategi

penguatan tata kelola keanekaragaman hayati, DJKN akan melaksanakan Proyek Prioritas integrasi data dan pengayaan IPTEK keanekaragaman hayati dengan target output berupa rekomendasi penguatan pengelolaan sumber daya alam. Terkait implementasi strategi penguatan instrumen pencegahan dampak lingkungan hidup, DJKN akan mengimplementasikan Proyek Prioritas pemulihan ekosistem mangrove dan lahan rusak dengan target output rekomendasi kebijakan pemanfaatan BMN untuk kegiatan usaha berdampak penting pada lingkungan

Prioritas Nasional 7 :

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

Pada Prioritas Nasional 7, DJKN diamanatkan untuk berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan (Program Prioritas) optimalisasi pendapatan negara dan optimalisasi belanja negara. Arah kebijakan

optimalisasi pendapatan negara dilaksanakan melalui strategi (Kegiatan Prioritas) intensifikasi penerimaan negara bukan pajak. Sedangkan arah kebijakan optimalisasi belanja negara dilaksanakan melalui strategi (Kegiatan Prioritas) peningkatan efektivitas belanja pemerintah pusat. Dalam rangka implementasi strategi intensifikasi penerimaan negara bukan pajak, DJKN akan melaksanakan Proyek Prioritas sebagai berikut.

1. Pembenahan tata kelola penerimaan SDA Migas, dengan target output berupa aplikasi Sistem Informasi Hulu Migas (SIHM).
2. Pembenahan tata kelola penerimaan Non-SDA, dengan target output berupa RUU terkait Pengelolaan Kekayaan Negara.
3. Pembenahan tata kelola pengelolaan aset, dengan target output berupa:
 - a. rekomendasi sinkronisasi kebijakan pengelolaan aset di

Jakarta dalam rangka pemindahan ibu kota;

- b. rekomendasi BMN berupa tanah yang disertipikatkan; dan
- c. aplikasi Sistem Informasi Manajemen Piutang Negara (SIMPaN)

Dalam rangka implementasi strategi peningkatan efektivitas belanja pemerintah pusat, DJKN akan melaksanakan Proyek Prioritas sebagai berikut.

1. Kebijakan tata kelola perencanaan dan penganggaran pembangunan, dengan target output berupa rekomendasi penyiapan kebijakan pengembangan Sistem Informasi Penilaian Nasional (SIPN+).
2. Sistem informasi perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan terintegrasi, dengan target output berupa aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) v2.

C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025

Rencana kerja dilaksanakan secara terencana dan terstruktur dengan mengacu pada arah kebijakan strategis KPKNL Serang. Rencana kerja mempertimbangkan secara komprehensif amanat yang tercantum dalam rancangan Rencana Strategis (Renstra), kebijakan prioritas nasional, serta program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran (Renja/RKA) DJKN Tahun 2025.

Dalam melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan

sebelumnya, KPKNL Serang telah membuat suatu penetapan kinerja yang merupakan ikhtisar dari rencana kerja yang akan dicapai pada satu waktu tertentu. Penetapan Kinerja KPKNL Serang tahun 2025 sesuai dengan peta strategis Kemenkeu Three Tahun 2025 terdiri dari 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian selengkapnya tentang SS dan IKU tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 1 Penetapan Kinerja Berdasarkan Peta Strategi Tahun 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP	Indeks integritas	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara	
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp19,6 M)
		2b-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset	
		2c-CP	Negara	100%
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-N	Persentase realisasi pokok lelang	100%
		3b-CP	(Rp240,4 M)	
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%
		4b-CP	(Rp1,2 M)	
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
		5b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan	
		5c-CP	komunikasi	74
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa	
		6b-N	tanah yang disertipikatkan	100%
		6c-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100,00
		7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80,00
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80,00
		8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100,00

Proses penyusunan serta penjelasan atas substansi Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, KPKNL Serang berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dihitung berdasarkan formula sesuai dengan jenis polarisasi IKU;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka

indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu:

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize*

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100 \%}{\text{Target}}$$

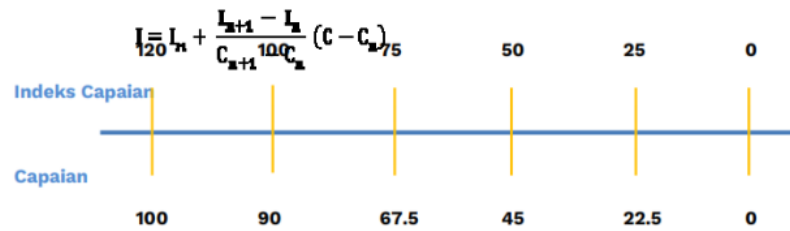
Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize*

2. IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

$$\text{Indeks Capaian} = [1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})] \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Stabilize*



- In = Indeks capaian
- In-1 = Indeks capaian di bawahnya
- In+1 = Indeks capaian di atasnya
- Ca = Capaian awal
- Cn = Realisasi/target x 100%
- Cn = Capaian dengan ketentuan:
 - A. Apabila Realisasi > Target, maka:
 - Cn = 100 - (Ca - 100), di mana Ca maksimum adalah 200%
 - B. Apabila Realisasi < Target, maka:
 - Cn = Capaian awal
 - Cn-1 = Capaian di bawahnya
 - Cn+1 = Capaian di atasnya

rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU stabilize mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

Seiring berjalannya waktu dalam pelaksanaan kinerja, KPKNL Serang telah melakukan penyesuaian terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyesuaian ini dituangkan dalam dua adendum perjanjian kinerja, dengan dokumen Adendum Perjanjian Kinerja Nomor PK-1a/WKN.06/2025 tanggal 17 November 2025 dengan rincian sebagai berikut:

IKU yang memiliki polarisasi stabilize, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu

1. Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula			Menjadi		
		Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp19,6 M)	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp23,7 M)
2.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp240,4 M)	2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp352,2 M)
2.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp1,2 M)	2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp1,5 M)

2. Perubahan Rincian Target Kinerja

Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							Menjadi								
		Target							Target								
		Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y	Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp19,6 M)	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp23,7 M)
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp240,4 M)	2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp352,2 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp1,2 M)	2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp1,5 M)

Rencana kerja KPKNL Serang di atas kemudian dijewantahkan dalam berbagai program dan kegiatan beserta pendanaannya (Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran/DIPA) yang akan terlihat pada angka-angka berikut.

Tabel 2 DIPA KPKNL Serang

PROGRAM KEGIATAN	Output	Rupiah
Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	15 Orang	Rp53.528.000,00
Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	24 Orang	Rp50.000.000,00
Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	3 Orang	Rp10.033.000,00
Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	80 Surat Keputusan	Rp89.772.000,00
Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	21 Surat Keputusan	Rp55.000.000,00
Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	265 rekomendasi	Rp20.304.000,00
Risalah Lelang	350 Dokumen	Rp19.906.000,00
Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan[Program Baru - Perubahan Kebijakan	1 rekomendasi	Rp8.320.000,00
Rekomendasi Hasil Penilaian	2 rekomendasi	Rp16.800.000,00
Penggalian Potensi Lelang	1 rekomendasi	Rp7.978.000,00
Aset BUN yang Dikelola	35 Aset	Rp298.631.000,00

PROGRAM KEGIATAN		Output	Rupiah
Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PN)	5	rekomendasi	Rp9.961.000,00
Layanan Bantuan Hukum	25	Layanan	Rp58.783.000,00
Layanan Perkantoran	12	Layanan	Rp2.023.623.000,00
Kerumahtanggaan	12	Layanan	Rp100.197.000,00
Peralatan Fasilitas Perkantoran	5	Unit	Rp80.032.000,00
Kendaraan Bermotor	2	Unit	Rp56.000.000,00
Pembinaan/Edukasi Publik	35	Orang	Rp3.525.000,00
Kehumasan	20	Kegiatan	Rp7.779.000,00
Pameran/Eksibisi	2	Kegiatan	Rp35.081.000,00
Rekomendasi Kepatuhan Internal	5	Dokumen	Rp20.584.000,00
JUMLAH			Rp3.025.837.000,00

D. Refinement Kinerja dan Risiko Tahun 2025 dan Tahun 2026

Refinement (penyempurnaan) kinerja dan manajemen risiko adalah proses proaktif berkelanjutan untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta memitigasi potensi ancaman yang dapat menghambat tujuan organisasi. Refinement bertujuan memperbaiki piagam risiko dan kinerja agar tetap relevan dengan kondisi terbaru, memastikan adanya kepatuhan, serta meminimalkan kerugian atau resiko. Proses ini krusial untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan layanan KPKNL Serang.

Berdasarkan hasil rapat Refinement Penyusunan Perjanjian

Kinerja (PK) dan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2025 pada KPKNL Serang, tidak ada masukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada PK UPK-One tahun 2024 yang digunakan sebagai hasil reviu dalam penyusunan PK UPK-One tahun 2025 serta usulan IKU CP atau mandatory yang mengacu pada Rancangan Teknokratik Renstra DJKN 2025-2029 berdasarkan Tema dan Identifikasi Awal Strategi dari KPKNL Serang.

Dalam prosesnya, setiap sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam PK Tahun 2026 dirumuskan melalui penyesuaian

antara target kinerja Kementerian Keuangan dan target kinerja unit eselon di atasnya dengan kondisi, kapasitas, serta tantangan yang dihadapi KPKNL Serang. Penyusunan PK juga memperhatikan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun berjalan.

Selain itu, penyusunan PK Tahun 2026 dilakukan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, keterukuran, dan relevansi, sehingga indikator kinerja yang ditetapkan mampu menggambarkan capaian kinerja secara objektif serta mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Proses ini juga melibatkan koordinasi dan komitmen seluruh jajaran guna memastikan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan.

Untuk tahun 2026, pada KPKNL Serang terdapat masukan atas IKU

Indeks Penangana Permasalahan Hukum yang tidak bisa dicapai maksimal sebanyak 120% dengan tingkat kendali adalah moderat. Padahal tingkat kendali IKU tersebut sangat rendah atau low oleh karena murni berdasarkan hasil putusan hakim atau masuknya gugatan dari pihak eksternal dan diharapkan untuk maksimal capaian dapat dilakukan konversi 120%.

Selanjutnya, diharapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 diharapkan menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja yang efektif, sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan KPKNL Serang dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Keuangan secara berkelanjutan.


Sementara itu. Manajemen Resiko pada KPKNL Serang untuk tahun 2025 dan 2026 tergambar berikut ini.

Tabel 3 Daftar Risiko KPKNL Serang Tahun 2025

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Periode	Residual Harapan
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1.1 Adanya pemanfaatan BMN K/L yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	10	5
2.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2.1 Optimalisasi Penggunaan BMN <i>Underutilized</i> Tidak Terlaksana Sesuai Rencana	13	11
		2.2 Adanya Pembatalan Lelang	13	11
		2.3 Piutang negara yang disetor rendah	6	5
3.	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3.1 Adanya keluhan/aduan layanan yang belum selesai ditindaklanjuti	13	10
		3.2 Kesalahan berulang terhadap prosedur ataupun dokumen	13	10
4.	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4.1 BMN Berupa Tanah Tidak Dilengkapi Dokumen Kepemilikan (Sertipikat Hak Pakai)	14	11
		4.2 Evaluasi Kinerja BMN Tidak Dapat Diimplementasikan Secara Efektif	11	10
5.	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5.1 Rendahnya Pelunasan Berkas Kasus Piutang Negara	6	5
		5.2 Adanya hambatan dalam pemberian layanan penilaian yang akuntabel dan professional	6	5
		5.3 Pembelian Barang jaminan dengan mekanisme Aset Yang Diambil Alih (AYDA) dalam pelaksanaan lelang hak tanggungan (<i>Upside Risk</i>)	6	8
6.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6.1 Ownership pegawai terhadap organisasi (termasuk pelanggaran non-fraud, seperti judi online dan pelanggaran atas nilai-nilai patriotisme)	11	10
		6.2 Tidak tercapainya target output yang telah ditetapkan	13	11
		6.3 Kualitas pengadaan BMN tidak sesuai dengan perencanaan	6	5
		6.4 Adanya pegawai yang tidak mengikuti pelatihan	6	5

Tabel 4 Daftar Risiko KPKNL Serang Tahun 2026

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Periode	Residual Harapan
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	1.1 Adanya keluhan/aduan layanan yang belum selesai ditindaklanjuti	13	10
		1.2 Kontribusi Bea Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Tinggi (<i>upside risk</i>)	25	25
2.	Pelayanan kekayaan negara, dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	2.1 Adanya ketidaksesuaian data sertipikat fisik, database pertanahan nasional, dan kondisi riil di lapangan	4	3
		2.2 Rendahnya pemahaman peserta terhadap materi pembinaan	5	1
3.	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	3.1 Sulitnya memenuhi dokumen persyaratan penerbitan PSBDT Terhadap Penanggung Utang Badan Usaha	6	1
		3.2 Kontribusi Pokok Lelang Jenis Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Yang Tinggi (<i>Upside Risk</i>)	25	25
4.	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4.1 Rendahnya kepatuhan K/L dalam pengawasan dan pengendalian BMN	2	1
		4.2 Satuan Kerja sulit memenuhi dokumen persyaratan penerbitan Sertipikat Kategori K1	1	1
		4.3 Terdapat rekomendasi evaluasi kinerja yang tidak ditindaklanjuti	4	3
5.	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5.1 Penerbitan Jumlah PSBDT Yang Optimal atas BKPN Tanpa Barang Jaminan (<i>Upside Risk</i>)	25	25
		5.2 Adanya layanan penilaian yang melewati norma waktu SOP	1	1
		5.3 Kontribusi Lelang Laku Jenis Lelang Non Eksekusi Wajib BMN/BMD Yang Rendah	6	5
6.	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	6.1 Adanya pegawai yang tidak mengikuti pelatihan	5	1
		6.2 Tidak tercapainya target output yang telah ditetapkan	13	11



Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran sebuah tanggung jawab yang berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika napas, ritme, dan kepercayaan dipertaruhkan: tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah yang tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus berpindah dengan tepat, seolah menemukan tempatnya yang baru pada saat yang paling menentukan.



03.

Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Agenda Prioritas
- C. Realisasi Anggaran
- D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- E. Kinerja Lain-Lain
- F. Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja



A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tahun 2025 terhadap 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Serang, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 116,25%. Seluruh IKU yang ditetapkan menunjukkan capaian kinerja $\geq 100\%$,

sehingga seluruh indikator berada pada kategori hijau dan mencerminkan pencapaian kinerja yang optimal.

Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:



Adapun rincian tabel terhadap capaian kinerja atas 19 (sembilan

belas) IKU dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Capaian Kinerja Tahun 2025

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai
Stakeholder Perspective (30%)				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya			
1a-CP	Indeks Integritas	100	105,32	105,32
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	219,24%	120
Customer Perspective (20%)				
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal			
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100,00%	110,26%	110,26
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100,00%	140,94%	120
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100,00%	109,06%	109,06
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa			
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	95,65	120
3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	95,35	120
Internal Process Perspective (25%)				
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif			

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%	128,15%	120
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	120%	120
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif			
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	111,50%	111,50
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	108,19	120
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%	116,89%	120
<i>Learning and Growth Perspective (25%)</i>				
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif			
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120	120
6b-CP	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	120	120
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	97,20%	120
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif			
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	115,49	115,49
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	110	120
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif			
8a-CP	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	98,16	120
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	134,72	120

Berikut ini adalah uraian analisis dan evaluasi kinerja terhadap 11 (sebelas) Sasaran Strategis Kemenkeu

Three KPKNL Serang Tahun 2025 untuk setiap Indikator Kinerja Utama:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang Yang Proaktif, Adaptif, Dan Terpercaya

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif dan terpercaya merupakan salah satu sasaran strategis utama yang mendukung terwujudnya visi Kementerian Keuangan. Sasaran ini menggarisbawahi pentingnya prinsip transparansi, pengukuran yang jelas, serta akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap proses pengelolaan. Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), KPKNL Serang turut berkontribusi dalam memberikan nilai tambah terhadap pengelolaan kekayaan negara yang optimal.

Dalam upayanya mencapai sasaran strategis tersebut, KPKNL Serang telah menetapkan dua Indikator Kinerja Utama (IKU). Kedua IKU ini berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan sekaligus acuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan kekayaan negara. Pencapaian dari masing-masing IKU dirangkum secara rinci dalam tabel berikut, menggambarkan kinerja KPKNL Serang yang mendukung prinsip pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab.

Tabel 6 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
1a-CP	Indeks Integritas	100	111	105,32
1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	219,24%	120

a. Indeks Integritas (1a-CP)

Tabel 7 Indeks Integritas

KPKNL SERANG		Nama Sasaran Strategis : Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya						
		Nama IKU : Indeks Integritas						
T/R	Q1	Q2	SM.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	100	100	100	111	111	111	111	
Capaian	100	100	100	111	111	111	111	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	111	111	

Target IKU Indeks Integritas KPKNL Serang pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 100. Pengukuran capaian Indeks Integritas dilakukan berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI). Hingga periode Triwulan IV Tahun 2025. Berdasarkan hasil tersebut, KPKNL Serang memperoleh nilai Indeks Integritas sebesar 111%, yang menunjukkan capaian kinerja melampaui target yang telah ditetapkan.

KPKNL Serang telah melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil **Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025** sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun, antara lain:

- Penguatan internalisasi nilai-nilai integritas dan budaya anti korupsi kepada seluruh pegawai;
- Peningkatan peran pimpinan dalam pengawasan dan keteladanan integritas;
- Sosialisasi dan penguatan pemahaman terkait benturan kepentingan;
- Optimalisasi mekanisme pengendalian internal dan pengaduan masyarakat;
- Monitoring dan evaluasi berkala atas pelaksanaan rencana aksi integritas. Berikut ini adalah perbandingan capaian IKU Indeks Integritas KPKNL Serang selama lima tahun terakhir:

Tabel 8 Perbandingan Indeks Integritas

KPKNL Serang	Perbandingan Indeks Integritas			
	Tahun	Target	Jumlah IKU Tercapai (≥ 100%)	Persentase Capaian
	2021	-	-	-
	2022	-	-	-
	2023	88,67	89,17	100,56
	2024	89,17	92,44	103,67
	2025	100	111	105,32

Pada dua tahun terakhir, capaian IKU Indeks Integritas menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Hasil ini mencerminkan upaya nyata KPKNL Serang dalam menindaklanjuti rekomendasi, meningkatkan pengelolaan integritas, dan memberikan perhatian penuh terhadap

pelaksanaan Action Plan. Pencapaian tersebut bukan hanya sekadar angka, melainkan bukti konkret dedikasi KPKNL Serang dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan kinerja yang terus tumbuh secara berkelanjutan.

b. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (1b-CP)

Tabel 9 Capaian IKU Persentase Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang proaktif, adaptif dan tepercaya							
	Nama IKU : 1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-2	Po/ K P
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	179,99%	273,89%	273,89%	198,50%	198,50%	218,83%	219,24%	
Capaian	179,99	273,89	273,89	198,50	198,50	219,24	219,24	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Realisasi nilai penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 berhasil mencapai

Rp51.891.970.419,00 atau sebesar 219,24% dari target tahunan.. Realisasi tersebut terdiri atas realisasi PNBPN Pengelolaan BMN

sebesar Rp32.017.593.321,00, realisasi PNBPN Piutang Negara sebesar Rp110.448.316,00, serta realisasi PNBPN Lelang sebesar Rp19.763.928.782,00, yang mana kontribusi PNBPN Lelang tersebut bersumber dari PNBPN Lelang Kelas I sebesar Rp19.328.338.834,00 dan PNBPN Lelang Pegadaian sebesar Rp431.589.948,00.

Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang hingga Triwulan IV Tahun 2025 mencapai Rp51.988.218.933,00.

Penerimaan tersebut terdiri atas beberapa komponen, yaitu PNBPN dari Pengelolaan BMN sebesar Rp32.017.593.321,00 dengan capaian 267,37%, PNBPN Piutang Negara sebesar Rp110.448.316,00 dengan capaian 167,91%, serta PNBPN Lelang sebesar Rp19.860.177.296,00 dengan capaian 170,15%.

Realisasi IKU Persentase Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang mencapai 218,83% dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 10 Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang

NO	Jenis PNBPN	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian
1.	Pengelolaan BMN	32.017.593.321,00	267,37%
2.	Piutang Negara	110.448.316,00	167,91%
3.	Total Target PNBPN Lelang	19.860.177.296,00	170,15%
Total Realisasi Penerimaan Negara		51.988.218.933,00	219,24%

Tindakan yang telah dilaksanakan oleh KPKNL Serang dalam upaya mencapai target kinerja antara lain meliputi penyampaian surat paksa kepada debitur piutang negara, pelaksanaan sosialisasi dan penagihan langsung kepada debitur, penyusunan dan pemutakhiran data piutang secara rutin setiap bulan oleh KPKNL Serang dan KPKNL Rangkasbitung, penyampaian surat secara triwulanan

kepada BLU Unit Usaha Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) dan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, serta pelaksanaan rekapitulasi PNBPN secara berkala berdasarkan data SLDK dan SIMPONI.

Berikut ini adalah perbandingan capaian kinerja KPKNL Serang dalam tahun terakhir, yang disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 11 Perbandingan Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Perbandingan Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang			
Tahun	Target	Jumlah IKU Tercapai ($\geq 100\%$)	Capaian
2021	100%	77,54%	77,54
2022	100%	141,13%	120,00
2023	100%	93,00%	120,00
2024	100%	134,35%	120,00
2025	100%	219,24%	120,00

Tren capaian ini mencerminkan komitmen KPKNL Serang dalam meningkatkan realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang secara konsisten. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, upaya strategis yang dilakukan terus membuahkan hasil positif.

KPKNL Serang juga melaksanakan rekapitulasi PNBPN yang diperoleh dari data SLDK dan SIMPONI, untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penerimaan negara yang terkait dengan kekayaan negara dan lelang. Selain itu, KPKNL Serang melaksanakan sosialisasi mengenai lelang eksekusi hak tanggungan, serta

merencanakan penerapan aplikasi lelang versi 2 yang telah mengalami *re-engineering* untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Tidak hanya itu, KPKNL Serang juga melakukan sosialisasi dan penggalian potensi lelang untuk memastikan bahwa seluruh aset yang dapat dilelang mendapatkan perhatian maksimal dan menghasilkan penerimaan negara yang optimal. Semua langkah ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pengelolaan kekayaan negara dan lelang di wilayah kerja KPKNL Serang.

2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal

Salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan. IKU ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan aset dan kekayaan negara, termasuk melalui kegiatan lelang, dilakukan dengan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi.

Pencapaian IKU ini diukur berdasarkan sejauh mana proses pengelolaan kekayaan negara dan lelang memenuhi harapan serta kebutuhan pengguna jasa, baik dari segi pelayanan, kecepatan, maupun kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Fokus utamanya adalah memberikan layanan yang optimal

kepada masyarakat, memastikan bahwa setiap transaksi lelang dan pengelolaan aset negara dilakukan secara profesional, serta meningkatkan tingkat kepuasan pengguna jasa. melalui pencapaian IKU ini, KPKNL Serang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, menciptakan transparansi dalam pengelolaan kekayaan negara, serta memberikan nilai lebih bagi negara dan masyarakat.

KPKNL Serang telah mengidentifikasi 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi fokus dalam upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.

Tabel 12 Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100,00%	110,26%	110,26
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100,00%	140,94%	140,94
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100,00%	109,06%	109,06

a. Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara (2a-CP)

Tabel 13 Capaian IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis : Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	Nama IKU : 2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	
Realisasi	163,89%	112,37%	112,37%	110,26%	110,26%	110,26%	110,26%	Max/TLK
Capaian	163,89%	187,28	187,28	137,82	137,82	110,26	110,26	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	110,26	110,26	

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, realisasi Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara pada KPKNL Serang mencapai 110,26%, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan unit kerja dalam mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan aset negara secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan optimalisasi pengelolaan aset negara, KPKNL Serang telah melaksanakan berbagai upaya strategis, antara lain:

- Peningkatan koordinasi dan asistensi kepada satuan kerja terkait pemanfaatan dan penatausahaan aset negara;
- Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap aset negara yang berpotensi untuk dioptimalkan;

- Pendampingan proses pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penetapan status penggunaan BMN sesuai ketentuan;
- Penguatan peran KPKNL dalam memberikan rekomendasi optimalisasi aset negara berbasis data dan analisis.

Optimalisasi pengelolaan aset negara sangat bergantung pada kesiapan dan usulan dari satuan kerja pengguna barang. Kondisi ini berimplikasi pada variasi capaian antar periode pelaporan serta memerlukan koordinasi yang berkelanjutan agar potensi aset negara dapat dimanfaatkan secara optimal.

Belum meratanya pemahaman dan kesiapan satuan kerja dalam mengusulkan skema optimalisasi aset negara, serta keterbatasan data pendukung pada sebagian aset,

menyebabkan proses optimalisasi tidak selalu dapat dilakukan secara serentak pada seluruh objek aset.

Capaian ini menjadi bukti keberhasilan KPKNL Serang dalam menjaga konsistensi kinerja, meskipun dihadapkan dengan berbagai

tantangan. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan efektivitas strategi yang diterapkan, tetapi juga komitmen seluruh tim untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pengelolaan BMN.

b. Persentase Realisasi Pokok Lelang (2b-CP)

Tabel 14 Capaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang

Nama Sasaran Strategis : Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal								
KPKNL SERANG								
Nama IKU : 2b-CP Persentase realisasi pokok lelang								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	181,36%	298,01%	298,01%	225,43%	225,43%	140,94%	140,94%	
Capaian	181,36	298,01	298,01	225,43	225,43	140,94	140,94	Max/TLK
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Target pokok lelang dari pengelolaan kekayaan negara Tahun 2025 setelah addendum ditetapkan sebesar Rp352.264.046.000,00. Hingga Triwulan IV, KPKNL Serang berhasil membukukan realisasi pokok lelang sebesar Rp 496.467.303.502,00, atau mencapai 140,94% dari target tahunan.

Capaian tersebut berasal dari beberapa sumber penerimaan, yaitu :

- pokok lelang PL Kelas I sebesar Rp469.875.380.402,00 dan
- pokok lelang pegadaian sebesar Rp26.099.497.400,00.

Berikut ini adalah tren perbandingan capaian Perbandingan Persentase Realisasi Pokok Lelang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir:

Tabel 15 Perbandingan Perbandingan Persentase Realisasi Pokok Lelang

KPKNL SERANG		Perbandingan Persentase Realisasi Pokok Lelang	
Tahun	Target	Jumlah IKU Tercapai (≥ 100%)	Persentase Capaian (%)
2021	100,00%	89,96%	89,83%
2022	100,00%	141,01%	120,00%
2023	100,00%	103,49%	103,49%
2024	100,00%	105,76%	105,76%
2025	100,00%	140,94%	120,00%

c. Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara (2b-CP)

Tabel 16 Capaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis : Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	Nama IKU : 2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	324,81%	289,53 %	289,53%	186,14%	186,14%	109,06%	109,06%	Max/TLK
Capaian	324,81	289,53	289,53	186,14	186,14	109,06	109,06	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	109,06	109,06	

KPKNL Serang mencatat kinerja yang sangat baik pada indikator Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal, khususnya Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara (2c-CP). Target yang ditetapkan sebesar 100% berhasil dilampaui secara konsisten sejak Triwulan I hingga Triwulan IV.

Berdasarkan penjelasan IKU, target outstanding piutang negara yang harus diselesaikan pada tahun

2025 sebesar Rp1,25 triliun, yang kemudian mengalami penyesuaian melalui addendum menjadi Rp1,535 triliun. Hingga akhir Triwulan IV Tahun 2025, realisasi penyelesaian piutang negara telah mencapai Rp1,674 triliun, atau 109,06% dari target tahunan. Capaian ini menunjukkan efektivitas upaya penagihan dan pengelolaan piutang negara yang dilakukan oleh KPKNL Serang.

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendukung

capaian tersebut antara lain penyampaian Surat Paksa kepada debitur sebagai langkah penegakan hukum dalam rangka percepatan penyelesaian piutang negara. Secara keseluruhan, kinerja ini mencerminkan komitmen KPKNL Serang dalam menjaga kualitas pengelolaan piutang

negara serta mendukung optimalisasi penerimaan negara.

perbandingan capaian Perbandingan Persentase Realisasi Pokok Lelang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir:

Tabel 17 Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara

KPKNL SERANG			
Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara			
Tahun	Target	Jumlah IKU Tercapai (≥ 100%)	Persentase Capaian (%)
2021	100,00%	159,04%	120,00%
2022	100,00%	134,08%	120,00%
2023	100,00%	184,70%	120,00%
2024	100,00%	111,92%	111,92%
2025	100,00%	109,06%	109,06%

Selama periode 2021-2025, capaian Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara di KPKNL Serang secara konsisten melampaui target tahunan sebesar 100%. Pada tahun 2021 hingga 2023, realisasi kinerja mencapai lebih dari 120%,

sehingga nilai capaian IKU berada pada batas maksimal penilaian.

Pada tahun 2024 dan 2025, meskipun realisasi mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kinerja tetap menunjukkan capaian di atas target, masing-masing sebesar 111,92% dan 109,06%

3. Pelayanan Kekayan Negara Dan Lelang Yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa

Sebagai bagian dari Rencana Strategis Kementerian Keuangan,

KPKNL berperan dalam menyelenggarakan pelayanan

kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa secara efektif dan profesional. Peran tersebut diwujudkan melalui pengelolaan kekayaan negara yang optimal, pelaksanaan lelang yang transparan dan akuntabel, serta pemberian layanan yang cepat, tepat,

dan berorientasi pada kepuasan pengguna, guna mendukung pengamanan aset negara dan optimalisasi penerimaan negara.

Komitmen ini diwujudkan melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), yang meliputi:

Tabel 18 Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77,00	95,65	124,22
3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74,00	95,35	128,85

a. Indeks kepuasan pengguna layanan (3a-N)

Tabel 19 Indeks kepuasan pengguna layanan

KPKNL SERANG		Nama Sasaran Strategis : Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa						
		Nama IKU : Indeks kepuasan pengguna layanan						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/ K P
Target	2%	13%	13%	53%	53%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	7,36%	16,43%	16,43%	44,05%	44,05%	105,76%	105,76%	
Capaian	341,45%	126,94%	126,94%	82,55%	82,55%	105,76%	105,76%	
Nilai Kinerja	120,00	120,00	120,00	82,55	82,55	105,76	105,76	

KPKNL Serang melaksanakan pelayanan kekayaan negara dan lelang yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pengguna jasa, sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan. Kinerja tersebut diukur melalui Indeks Kepuasan Pengguna

Layanan (IKPL) dengan target tahunan sebesar 77.

Hingga akhir Triwulan IV Tahun 2025, realisasi IKPL KPKNL Serang mencapai 4,84 (skala 5) atau setara 96,80 setelah dikonversi, dengan nilai rata-rata tahunan sebesar 95,65.

Capaian tersebut melampaui target yang telah ditetapkan dan menghasilkan nilai kinerja maksimal 120, yang menunjukkan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi ekspektasi dan kebutuhan pengguna jasa.

Untuk mendukung pencapaian tersebut, KPKNL Serang secara aktif melakukan penyebaran tautan

kuesioner kepuasan layanan kepada para pemangku kepentingan, guna memperoleh umpan balik secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas layanan. Hasil pengukuran ini menjadi indikator bahwa pelaksanaan pelayanan kekayaan negara dan lelang telah berjalan secara profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna.

b. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi (3b-CP)

Tabel 20 Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

KPKNLSERANG								
Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa								
3b-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Po/ K P
Target	74	74	74	74	74	74	74	
Realisasi	100	98,78	99,39	85	94,59	97,64	95,35	Max/TLK
Capaian	119,73	122,07	122,07	123,72	123,72	124,22	124,22	
Nilai Kinerja	120	120	120	115	120	120	120	

Upaya peningkatan kualitas pelayanan kekayaan negara dan lelang melalui penguatan edukasi dan komunikasi kepada pengguna jasa, sebagai bagian dari pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Keuangan. Kinerja tersebut diukur melalui Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi (3b-CP) dengan target tahunan sebesar 74 dengan realisasi indeks sampai dengan akhir Triwulan

IV tahun 2025 mencapai 97,64, dengan nilai rata-rata tahunan sebesar 95,35, sehingga capaian kinerja memperoleh nilai maksimal 120. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi dan komunikasi yang dilaksanakan telah berjalan secara efektif dan mampu meningkatkan pemahaman serta keterlibatan pengguna jasa terhadap layanan KPKNL Serang.

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator tersebut, KPKNL Serang telah melaksanakan sosialisasi serta pengumpulan dan pengolahan hasil kuesioner edukasi dan komunikasi, termasuk pada layanan lelang dan pengelolaan piutang

negara. Kegiatan ini menjadi sarana evaluasi berkelanjutan untuk memastikan penyampaian informasi layanan dilakukan secara jelas, tepat sasaran, dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan.

4. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

Sebagai bagian dari komitmen dalam mendukung pengelolaan kekayaan negara, KPKNL melaksanakan penilaian aset negara secara akuntabel dan profesional. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengedepankan prinsip objektivitas, independensi, dan transparansi, guna

menghasilkan nilai yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pengamanan aset negara.

Komitmen ini diwujudkan melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), yang meliputi:

Tabel 21 Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100,00%	128,15%	128,15
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100,00%	120,00%	120,00

a. Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan (4a-CP)

Tabel 22 Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan

KPKNL SERANG	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4a-CP Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	
Realisasi	42,96%	45,93%	45,93%	73,33%	73,33%	128,15%	128,15%	
Capaian	859,26	114,81	114,81	122,22	122,22	128,15	128,15	Max/TLK
Nilai Kinerja	120	114,81	114,81	120	120	120	120	

Sebagai bagian dari komitmen dalam mendukung penerapan tata kelola aset yang efektif, KPKNL Serang melaksanakan pengamanan hukum atas Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah melalui kegiatan sertipikasi. Kinerja ini diukur melalui indikator Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan (4a-CP) dengan target tahunan sebesar 100%.

Hingga akhir Triwulan IV Tahun 2025, realisasi sertipikasi BMN tanah mencapai 128,15%, melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut diperoleh dari target awal sebanyak 135 bidang tanah, dengan realisasi sebanyak 173 bidang. Hasil ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan pengamanan aset negara yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Untuk mendukung pencapaian tersebut, KPKNL Serang telah melakukan monitoring dan

evaluasi serta pendampingan kepada satuan kerja yang memiliki BMN berupa tanah, termasuk koordinasi intensif dengan Kantor Pertanahan, guna mempercepat proses sertipikasi dan meminimalkan potensi permasalahan hukum atas aset negara. Kegiatan ini menjadi bagian integral dalam upaya meningkatkan kepastian hukum dan akuntabilitas pengelolaan BMN. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian sertifikasi BMN, mengoptimalkan pengelolaan aset negara, dan memenuhi target yang telah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025.

Berikut adalah perbandingan capaian Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan selama lima tahun terakhir:

Tabel 23 Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan

KPKNL SERANG		Perbandingan Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	
Tahun	Target	Jumlah IKU Tercapai ($\geq 100\%$)	Persentase Capaian (%)
2021	100%	100,00%	100,00%
2022	100%	106,74%	106,74%
2023	100%	131,90%	120,00%
2024	100%	132,63%	120,00%
2025	100%	128,15%	120,00%

Selama periode Tahun 2021-2025, kinerja Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan di KPKNL Serang menunjukkan tren yang meningkat dan konsisten melampaui target yang ditetapkan sebesar 100 persen setiap tahunnya.

Pada Tahun 2021, capaian berada tepat pada target, yaitu 100,00 persen. Selanjutnya, pada Tahun 2022, kinerja meningkat dengan capaian sebesar 106,74 persen. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada Tahun 2023 dan 2024, dengan realisasi masing-masing sebesar 131,90 persen dan 132,63 persen, sehingga nilai capaian IKU

mencapai batas maksimal penilaian sebesar 120 persen.

Pada Tahun 2025, meskipun realisasi sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tetap berada pada level yang sangat baik, yaitu 128,15 persen, dan kembali memperoleh nilai capaian maksimal 120 persen. Capaian ini mencerminkan keberhasilan KPKNL Serang dalam mendorong percepatan sertifikasi BMN berupa tanah melalui penguatan koordinasi dengan instansi terkait serta peningkatan kualitas pengelolaan data aset.

b. Persentase evaluasi kinerja BMN (4b-CP)

Tabel 24 Capaian IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian

KPKNL SERANG	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	15,44%	50,85%	50,85%	112,80%	112,80%	120%	120%	
Capaian	102,96	101,70	101,70	150,40	150,40	120,00	120,00	
Nilai Kinerja	102,96	101,70	101,70	120	120	120	120	

Sebagai bagian dari upaya penerapan tata kelola aset yang efektif, KPKNL Serang melaksanakan evaluasi kinerja Barang Milik Negara (BMN) secara sistematis dan berkelanjutan. Kinerja ini diukur melalui indikator Evaluasi Kinerja BMN (4b-CP) dengan target tahunan sebesar 100%.

Hingga akhir Triwulan IV Tahun 2025, realisasi evaluasi kinerja BMN mencapai 120%, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan dan memperoleh nilai kinerja maksimal 120. Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan evaluasi terhadap 334 aset BMN yang telah dinilai kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya kepada satuan kerja, serta 265 aset BMN yang menjadi objek evaluasi lanjutan. Dari hasil evaluasi tersebut, telah dihasilkan 17 rekomendasi evaluasi kinerja BMN,

yang seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja, sehingga tingkat realisasi tindak lanjut rekomendasi mencapai 100%.

Pelaksanaan evaluasi kinerja BMN ini menjadi instrumen penting dalam mendorong peningkatan kualitas pengelolaan aset negara, khususnya dalam memastikan pemanfaatan BMN dilakukan secara optimal, efisien, dan sesuai dengan peruntukannya. Hasil evaluasi juga digunakan sebagai dasar pembinaan kepada satuan kerja dalam rangka perbaikan tata kelola BMN secara berkelanjutan.

Berikut adalah perbandingan capaian Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) dalam lima tahun terakhir, yang menggambarkan hasil evaluasi dan pengelolaan BMN yang telah dilakukan oleh KPKNL Serang:

Tabel 25 Perbandingan IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian

KPKNL SERANG		Perbandingan Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	
Tahun	Target	Jumlah IKU Tercapai (≥ 100%)	Persentase Capaian (%)
2021	100%	100,00%	100,00%
2022	100%	118,86%	118,86%
2023	100%	127,84%	120,00%
2024	100%	121,33%	120,00%
2025	100%	120,00%	120,00%

5. Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang Yang Profesional dan Produktif

Sebagai bagian dari pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif, KPKNL melaksanakan tugas dan fungsi secara terintegrasi dengan mengedepankan akuntabilitas, kepastian hukum, dan optimalisasi hasil. Pelayanan tersebut dilaksanakan melalui pengelolaan piutang negara yang efektif,

pelaksanaan penilaian yang objektif dan andal, serta penyelenggaraan lelang yang transparan dan kompetitif, guna mendukung penerimaan negara dan pengamanan aset negara.

Indikator Kinerja Utama (IKU), yang meliputi:

Tabel 26 Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang Yang Profesional dan Produktif

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%	111,50%	111,50
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70,00%	108,19%	154,55
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80,00%	116,89%	146,11

a. Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (5a-CP)

Tabel 27 Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara

KPKNL SERANG	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	110%	110,67%	110,67%	111,11%	111,11%	111,50%	111,50%	Max/TLK
Capaian	110,00	110,67	110,67	111,11	111,11	111,50	111,50	
Nilai Kinerja	110	110,67	110,67	111,11	111,11	111,50	111,50	

Target Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara (IKU 5a-CP) pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 100 persen atau setara dengan 20 Berkas Piutang Negara (BPN) yang harus diselesaikan. IKU ini digunakan untuk mengukur efektivitas kinerja KPKNL Serang dalam menyelesaikan berkas piutang negara secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, KPKNL Serang berhasil mencatatkan realisasi penyelesaian berkas piutang negara sebesar 111,50 persen, sehingga melampaui target tahunan yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja secara konsisten sejak awal tahun.

Secara periodik, realisasi capaian IKU tercatat sebesar 110,00 persen pada Triwulan I, meningkat menjadi 110,67 persen pada Triwulan II, kemudian kembali meningkat menjadi 111,11 persen pada Triwulan III, dan mencapai 111,50 persen pada Triwulan IV. Peningkatan tersebut mencerminkan efektivitas pengelolaan dan pengendalian penyelesaian berkas piutang negara sepanjang Tahun 2025.

Berikut adalah perbandingan capaian Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) di KPKNL Serang selama lima tahun terakhir, yang mencerminkan hasil pengelolaan dan penyelesaian BKPN:

Tabel 28 Perbandingan Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara

KPKNL SERANG		Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	
Tahun	Target	Jumlah IKU Tercapai (≥ 100%)	Persentase Capaian (%)
2021	100%	123,53%	120,00%
2022	100%	121,11%	120,00%
2023	100%	110,64%	110,64%
2024	19%	-50%	120,00%
2025	100%	111,50%	111,50

b. Tingkat kualitas layanan penilaian (5b-CP)

Tabel 29 Tingkat kualitas layanan penilaian

KPKNL SERANG		Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif						
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
Realisasi	110,69%	109,97%	110,33%	113,25%	111,30%	108,19%	108,19%	Max/TLK
Capaian	158,12	157,61	157,61	159,00	159,00	154,55	154,55	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

IKU 5b-CP Tingkat Kualitas Layanan Penilaian merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan penilaian yang diberikan oleh KPKNL Serang kepada para pemangku kepentingan, khususnya dari aspek ketepatan waktu, kesesuaian prosedur, serta kualitas hasil penilaian. Target IKU ini pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 70 persen pada setiap triwulan.

Sepanjang Tahun 2025, kinerja KPKNL Serang pada IKU 5b-CP menunjukkan capaian yang sangat optimal dan konsisten melampaui target. Pada Triwulan I, realisasi tingkat

kualitas layanan penilaian mencapai 110,69 persen, kemudian relatif stabil pada Triwulan II sebesar 109,97 persen, dengan capaian Semester I sebesar 110,33 persen.

Kinerja tersebut terus meningkat pada Triwulan III, dengan realisasi mencapai 113,25 persen, dan secara kumulatif hingga s.d. Triwulan III tercatat sebesar 111,30 persen. Hingga Triwulan IV Tahun 2025, realisasi IKU tercatat sebesar 108,19 persen, yang sekaligus menjadi realisasi tahunan (Y-25).

c. Persentase produktivitas lelang (5c-CP)

Tabel 30 Persentase produktivitas lelang

KPKNL SERANG								
Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif								
5c-CP Persentase produktivitas lelang								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	49,45%	51,35%	51,35%	120%	120%	116,89%	116,89%	
Capaian	164,83	128,38	128,38	171,43	171,43	146,11	146,11	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

KPKNL Serang terus berupaya mengoptimalkan kinerja layanan lelang di wilayah kerjanya guna memberikan hasil yang profesional dan produktif. Keberhasilan ini tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama 5c-CP Persentase Produktivitas Lelang yang menetapkan target tahunan sebesar 80%.

Sepanjang tahun 2025, realisasi produktivitas lelang menunjukkan performa yang sangat impresif dan konsisten melampaui target. Dimulai dengan realisasi 49,45% pada Triwulan I, angka tersebut meningkat menjadi

51,35% di Triwulan II, dan melonjak tajam hingga mencapai 120% pada Triwulan III. Tren positif ini berhasil dipertahankan hingga akhir tahun dengan realisasi sebesar 116,89%. Dengan hasil tersebut, nilai kinerja akhir tahun tercatat sebesar 120 dengan kategori Max/TLK, yang membuktikan efektivitas strategi pemasaran dan tingginya minat masyarakat terhadap layanan lelang kami.

Komponen IKU Persentase Produktivitas Lelang lingkup KPKNL Serang berasal dari:

Tabel 31 Komponen Persentase produktivitas lelang

No	Komponen Persentase Produktivitas Lelang	Target	Realisasi
1.	Lelang Non eksekusi Sukarela	75%	88,89%
	% Lot Laku Lelang noneksekusi sukarela		66,67%
	Jumlah realisasi lot lelang laku		12,00
	Jumlah lot lelang		18,00
2.	Lelang Non eksekusi Wajib	55%	120,00%
	% Lot Laku Lelang noneksekusi wajib		92,45%
	Jumlah realisasi lot lelang laku		147,00
	Jumlah lot lelang		159,00
3.	Lelang eksekusi HT, Pailit, dan Pengadilan	5%	120,00%
	% Lot Laku Lelang eksekusi HT, Pailit, dan Pengadilan		7,92%
	Jumlah realisasi lot lelang laku		164,00
	Jumlah lot lelang		2071,00
4.	Lelang eksekusi selain HT, Pailit, dan Pengadilan	25%	120,00%
	% Lot Laku Lelang eksekusi selain HT, Pailit, dan Pengadilan		70,49%
	Jumlah realisasi lot lelang laku		86,00
	Jumlah lot lelang		122,00

6. Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, Dan Lelang Yang Profesional Dan Produktif

Pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang akuntabel, serta didukung oleh sumber daya manusia yang adaptif, dilaksanakan melalui penerapan tata kelola yang transparan, tertib administrasi, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Upaya tersebut diperkuat dengan peningkatan kompetensi dan

kapabilitas SDM agar mampu merespons dinamika regulasi, kebutuhan organisasi, serta perkembangan teknologi, guna mendukung pencapaian kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Dalam mewujudkan hal tersebut, terdapat tiga komponen Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

Tabel 32 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100,00	120,00	120,00
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100,00	120,00	120,00
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80,00%	97,20%	121,50

a. Indeks kualitas kinerja anggaran (6a-CP)

Tabel 33 Indeks kualitas kinerja anggaran

KPKNL SERANG		Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif						
		6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	120	92,89	92,89	96,01	96,01	120	120	Max/TLK
Capaian	120,00	95,78	95,78	96,01	96,01	120,00	120,00	
Nilai Kinerja	120	95,78	95,78	96,01	96,01	120	120	

Pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang akuntabel di KPKNL Serang tercermin melalui pencapaian IKU 6a-CP Indeks Kualitas Kinerja Anggaran (IKPA) dengan target indeks sebesar 100. Meskipun pada Triwulan II realisasi sempat berada pada angka 92,89%, KPKNL Serang segera melakukan langkah perbaikan melalui monitoring rencana penarikan dana pada masing-masing seksi secara berkala, guna memastikan pelaksanaan anggaran tetap selaras dengan target yang telah disepakati.

Upaya perbaikan tersebut membuahkan hasil yang optimal pada Triwulan IV, dengan realisasi indeks mencapai 120. Capaian ini didukung oleh nilai IKPA sebesar 96,86 dan nilai SMART sebesar 100, sehingga capaian akhir IKU 6a-CP berada pada kategori Max/TLK dengan nilai kinerja 120.

Berikut adalah perbandingan capaian Indeks Kinerja Anggaran (IKA) KPKNL Serang selama beberapa tahun terakhir:

Tabel 34 Indeks kualitas kinerja anggaran

KPKNL SERANG		Perbabandingan Indeks kualitas kinerja anggaran	
Tahun	Target	Jumlah IKU Tercapai (≥ 100%)	Persentase Capaian (%)
2021	95,50%	95,45%	99,95%
2022	95,5%	92,42%	96,77%
2023	100	95,16	95,16%
2024	100	120	120,00%
2025	100	120	120,00%

b. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa (6b-N)

Tabel 35 Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa

KPKNL SERANG	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	100	100	100	103,63	103,63	120	120	Max/TLK
Capaian	100,00	100,00	100,00	103,63	103,63	120,00	120,00	
Nilai Kinerja	100	100	100	103,63	103,63	120	120	

Pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang akuntabel, serta dukungan sumber daya manusia yang adaptif di KPKNL Serang, juga tercermin melalui pencapaian IKU 6b-N Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dengan target indeks sebesar 100.

Sepanjang Tahun 2025, realisasi indeks pada Triwulan I hingga Semester I tercatat 100, menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa telah berjalan sesuai ketentuan. Pada Triwulan III, realisasi meningkat menjadi 103,63, dan terus

mengalami peningkatan hingga mencapai 120 pada Triwulan IV. Dengan capaian tersebut, nilai kinerja IKU 6b-N pada akhir tahun berada pada kategori Max/TLK dengan nilai kinerja 120.

Capaian ini didukung oleh penguatan perencanaan pengadaan, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang dan jasa, serta optimalisasi peran pejabat pengadaan dan tim pendukung dalam setiap tahapan proses pengadaan. Selain itu, KPKNL Serang juga secara konsisten melakukan monitoring dan

evaluasi pelaksanaan pengadaan, guna memastikan proses berjalan

secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu.

c. Persentase pengembangan kompetensi pegawai (6c-N)

Tabel 36 Persentase pengembangan kompetensi pegawai

KPKNL SERANG	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	
Realisasi	15,14%	46,71%	46,71%	86%	86%	97,20%	97,20%	Max/TLK
Capaian	130,69	169,29	169,29	143,33	143,33	121,50	121,50	
Nilai Kinerja	75,69	116,79	116,79	120	120	120	120	

Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan pengembangan kompetensi aparatur dalam rangka membangun sumber daya manusia yang adaptif, profesional, dan siap menghadapi dinamika organisasi. Indikator ini mencerminkan komitmen organisasi dalam memastikan setiap pegawai memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan jabatan, perkembangan regulasi, serta kemajuan teknologi.

Pada Tahun 2025, target pengembangan kompetensi pegawai ditetapkan sebesar 80%. Pada awal tahun, realisasi pada Triwulan I tercatat sebesar 15,14%, masih

berada di bawah target tahapan. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi KPKNL Serang untuk melakukan langkah percepatan melalui peningkatan partisipasi pegawai dalam berbagai kegiatan pengembangan kompetensi, baik melalui pelatihan klasikal, pelatihan nonklasikal, bimbingan teknis, maupun pembelajaran mandiri yang terdokumentasi.

Upaya tersebut menunjukkan hasil yang signifikan, di mana realisasi meningkat menjadi 46,71% pada Triwulan II dan 86% pada Triwulan III. Hingga akhir Triwulan IV Tahun 2025, realisasi pengembangan kompetensi pegawai mencapai 97,20%, melampaui target tahunan yang telah ditetapkan. Dengan capaian tersebut, nilai kinerja

indikator ini berada pada kategori Max/TLK dengan nilai kinerja 120.

Capaian pengembangan kompetensi ini didukung oleh beberapa aspek utama, antara lain pemenuhan jam pelatihan minimal 20 JP oleh seluruh pegawai yang memenuhi kriteria, tingkat pemenuhan panggilan pelatihan sebesar 100%, serta penguatan pembinaan mental dan sinergi antar

generasi yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja individu dan organisasi. Seluruh pegawai aktif yang memenuhi kriteria (27 dari 27 pegawai) telah mengikuti pengembangan kompetensi sesuai ketentuan.

Berikut adalah perbandingan capaian Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai di KPKNL Serang dalam lima tahun terakhir:

Tabel 37 Perbandingan Persentase pengembangan kompetensi pegawai

KPKNL SERANG			
Perbandingan Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai			
Tahun	Target	Jumlah IKU Tercapai (≥ 100%)	Persentase Capaian (%)
2021	100%	120,00%	120,00%
2022	100%	120,00%	120,00%
2023	100%	120,00%	120,00%
2024	80%	105,00%	120,00%
2025	97,20%	97,20%	121,50%

7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif dilaksanakan melalui penguatan kepastian hukum, penyelesaian permasalahan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, serta penyampaian informasi yang transparan dan akuntabel kepada publik.

Upaya tersebut didukung dengan koordinasi yang intensif dengan para pemangku kepentingan serta pemanfaatan kanal komunikasi yang responsif, guna membangun kepercayaan publik dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Tabel 38 Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100,00	115,03	115,03
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80,00	110,00	137,50

a. Indeks penanganan permasalahan hukum (7a-CP)

Tabel 39 Indeks penanganan permasalahan hukum

KPKNL SERANG	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/ K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	112,75	117,25	117,25	116,86	116,86	115,49	115,49	Max/TLK
Capaian	112,75	117,25	117,25	116,86	116,86	115,03	115,03	
Nilai Kinerja	112,75	117,25	117,25	116,86	116,86	115,49	115,49	

KPKNL Serang berhasil mencatatkan performa yang sangat impresif pada indikator penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif. Sepanjang tahun, realisasi kinerja secara konsisten melampaui target yang ditetapkan sebesar 100. Puncak capaian tertinggi terjadi pada Semester I dengan angka 117,25, dan diakhiri dengan realisasi tahunan (Y-25) yang tetap solid di angka 115,49.

Keberhasilan melampaui target ini didorong oleh efektivitas pada dua area utama. Pertama, pada indeks penanganan masalah hukum di pengadilan, tim berhasil

mengelola 8 perkara dengan nilai indeks mencapai 111,03. Kedua, hasil yang lebih signifikan terlihat pada indeks putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht), di mana dari 3 perkara yang ada, diraih nilai indeks sebesar 133,33. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas penanganan perkara hukum tidak hanya memenuhi standar kuantitas, tetapi juga memiliki kualitas pembelaan atau penyelesaian yang sangat baik.

Secara keseluruhan, capaian akhir sebesar 115,49 ini menegaskan bahwa penanganan permasalahan hukum di KPKNL Serang telah berjalan melampaui

ekspektasi. Konsistensi nilai yang terjaga dari triwulan pertama hingga akhir tahun mencerminkan tata kelola administrasi

hukum yang rapi serta koordinasi yang kuat dalam menghadapi setiap perkara yang muncul.

b. Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) (7a-CP)

Sepanjang tahun 2025, KPKNL Serang mencatatkan kinerja yang sangat memuaskan dalam pengelolaan layanan informasi publik. Target tahunan yang ditetapkan sebesar 80 berhasil dilampaui dengan realisasi akhir tahun mencapai 110, sehingga memberikan nilai capaian maksimal sebesar 120. Performa ini menunjukkan tren yang sangat stabil sejak triwulan pertama, di mana seluruh periode pelaporan konsisten menghasilkan nilai capaian di angka 120.

Analisis terhadap detail komponen menunjukkan bahwa kontribusi utama berasal dari aspek ketepatan waktu. Komponen ketepatan waktu penyampaian

laporan informasi publik mencatatkan indeks sempurna sebesar 120,00.

Selain itu, ketepatan waktu penyediaan dan pemutakhiran informasi publik pada website juga memenuhi target dengan nilai indeks 100,00, yang didukung oleh realisasi publikasi informasi sebesar 100%.

Capaian yang melampaui target ini menegaskan komitmen KPKNL Serang dalam menjaga transparansi dan kualitas layanan informasi kepada masyarakat. Dengan realisasi s.d. Triwulan IV yang mencapai 110 dari target 80, unit kerja telah membuktikan efektivitas sistem pengelolaan informasi publik (PPID) yang dijalankan sepanjang tahun.

Tabel 40 Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)

KPKNL SERANG		Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif 7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)							Pol/ K P
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25		
Target	80	80	80	80	80	80	80		
Realisasi	115	105	110	110	110	110	110	Max/TLK	
Capaian	143,75	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50		
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120		

8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif dilaksanakan melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara konsisten, penguatan fungsi pengawasan melekat, serta identifikasi dan mitigasi risiko secara berkelanjutan.

Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi berjalan sesuai ketentuan, meminimalkan potensi penyimpangan, serta mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi

Tabel 41 Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80,00	98,42	123,02
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100,00	134,72	134,72

a. Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko (8a-N)

Tabel 42 Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

KPKNL SERANG	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/TLK
Realisasi	99,24	98,07	98,07	98,77	98,77	98,21	98,16	
Capaian	124,05	122,86	122,86	123,46	123,46	123,02	122,69	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Sepanjang Tahun 2025, realisasi IKU 8a-N menunjukkan kinerja yang konsisten melampaui target. Pada Triwulan I, realisasi indeks tercatat sebesar 99,24, kemudian pada Triwulan II mencapai 98,07, dengan capaian Semester I sebesar 98,07.

Kinerja tersebut kembali meningkat pada Triwulan III, dengan realisasi sebesar 98,77, dan secara kumulatif hingga s.d. Triwulan III tetap berada pada angka 98,77.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, realisasi IKU tercatat sebesar 98,21, dengan realisasi tahunan (Y-25) sebesar 98,16. Berdasarkan realisasi tersebut, capaian IKU berada pada

rentang 122,69 hingga 124,05, sehingga memperoleh Nilai Kinerja maksimal sebesar 120 pada seluruh periode penilaian.

b. Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM (8a-N)

Tabel 43 Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM

KPKNL		Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif						
SERANG		8b-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Po/ K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	100	100	100	100	100	134,72	134,72	Max/TLK
Capaian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	134,72	134,72	
Nilai Kinerja	100	100	100	100	100	120	120	

Menjaga keberlanjutan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2025 sebesar 100 berhasil dilampaui dengan realisasi akhir tahun mencapai 134,72. Sesuai dengan parameter penilaian yang berlaku, capaian final untuk indikator ini adalah 120, yang merupakan nilai maksimal.

Keberlanjutan prestasi ini terlihat dari konsistensi unit kerja yang memenuhi target 100 sejak triwulan pertama hingga triwulan ketiga. Lonjakan realisasi yang signifikan terjadi pada Triwulan IV, di mana

angka capaian menyentuh 134,72. Peningkatan ini selaras dengan posisi KPKNL Serang yang masuk dalam daftar unit kerja dengan pemenuhan target IKU 100% pada tingkat capaian unit kerja periode Triwulan III 2025.

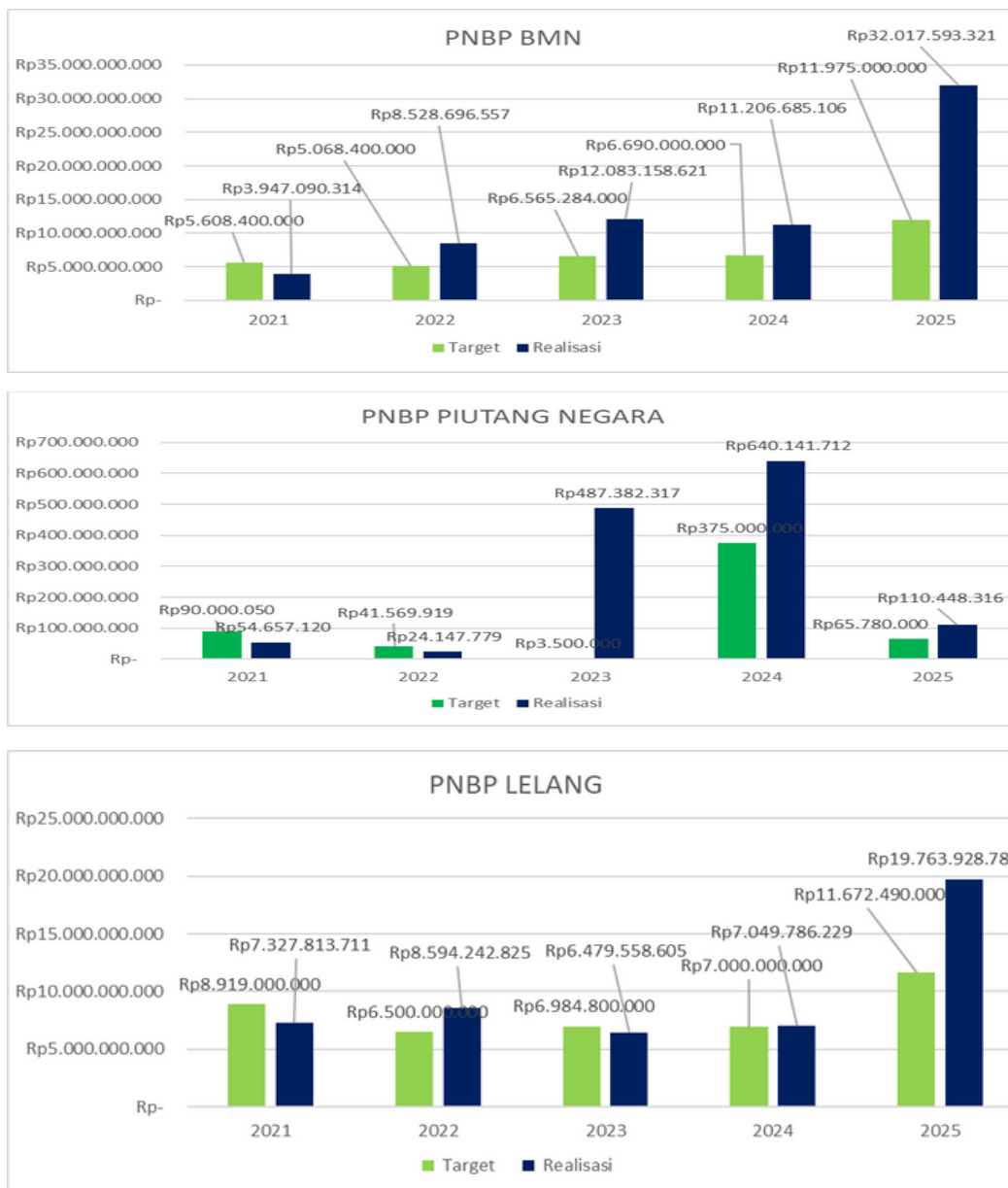
Salah satu tindakan nyata yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian ini adalah penyampaian bahan paparan untuk kegiatan Field Evaluation sebagai bentuk pertanggungjawaban dan verifikasi atas keberlanjutan standar pelayanan serta integritas di lingkungan kerja. Hasil ini menegaskan bahwa budaya kerja berintegritas telah terinternalisasi dengan baik dan berkelanjutan di KPKNL Serang.

B. Realisasi Kinerja Prioritas

Realisasi Kinerja Prioritas KPKNL Serang sangat terkait dengan realisasi kinerja KPKNL Serang pada umumnya seperti yang telah dijabarkan pada poin A sebelumnya. Namun demikian, khusus terkait optimalisasi

Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai salah satu kinerja prioritas DJKN, pada KPKNL Serang selama lima tahun terakhir akan tergambar pada grafik berikut.

Grafik 2 Penerimaan Negara Bukan Pajak



Dalam upaya pencapaian target IKU, KPKNL Serang menerapkan prinsip Gender *Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* yang diimplementasikan melalui beberapa aspek sebagai berikut:

1. Kesetaraan Gender (*Gender Equality*)

- a) Seluruh pegawai KPKNL Serang dibekali pelatihan *service excellent* untuk memberikan pelayanan yang adil, setara, dan nondiskriminatif kepada seluruh pengguna layanan tanpa membedakan gender.
- b) Proses bisnis KPKNL Serang dirancang untuk menjamin bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang.

2. Disabilitas (*Disability*)

- a) Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Serang telah dilengkapi

dengan sarana dan prasarana yang ramah bagi penyandang disabilitas

- b) Informasi layanan yang disajikan pada website KPKNL Serang dilengkapi dengan fitur aksesibilitas guna memudahkan penyandang disabilitas dalam memperoleh informasi.

3. Inklusi Sosial (*Social Inclusion*)

- a) Proses bisnis KPKNL Serang memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses dan kesempatan yang setara dalam memperoleh layanan di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang.
- b) KPKNL Serang secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan *public campaign* di ruang publik sebagai sarana sosialisasi layanan, peningkatan keterbukaan informasi, serta penguatan gerakan anti korupsi.

C. Realisasi Anggaran

Perhitungan capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2024 yaitu berdasarkan SE-8/MK.1/2021 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan terdiri atas perhitungan nilai IKPA dan nilai SMART DJA. Nilai IKPA terdiri atas 13 (tiga belas) komponen yang terdiri dari

Pengelolaan UP, Data Kontrak, Kesalahan SPM, Retur SP2D, Halaman III DIPA, Revisi DIPA, Penyelesaian Tagihan, Kinerja Capaian Output, Rekonsiliasi LPJ, Perencanaan Kas, Realisasi Anggaran, Pagu Minus, dan Dispensasi SPM. Perhitungan capaian kinerja yang terbagi dalam nilai IKPA dan nilai SMART DJA tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 44 Capaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Serang

Indikator IKU Indeks Kinerja Anggaran		Capaian s.d. Triwulan IV
A. Nilai IKPA		94,75%
1	Revisi DIPA	100,00%
2	Deviasi Halaman III DIPA	79,00%
3	Belanja Kontraktual	94,67%
4	Pengelolaan UP dan TUP	99,78%
5	Penyerapan anggaran	92,29%
6	Penyelesaian Tagihan	100,00%
7	Capaian Output	100,00%
8	Dispensasi SPM (Pengurang)	0,00%
B. Nilai SMART		100,00%
Nilai Capaian IKU IKA s.d. Triwulan IV		97,38%

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kinerja Anggaran (IKA) pada Triwulan IV merupakan capaian yang dihitung berdasarkan metode evaluasi yang mengacu pada Monev Kemenkeu. Perhitungan capaian ini dilakukan dengan menggunakan proporsi sebagai berikut:

- 50% Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)
- 50% Nilai IKA (Indikator Kinerja Anggaran)

Metode ini dirancang untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran,

dengan mempertimbangkan berbagai aspek kinerja keuangan.

Pada Triwulan III, ditemukan realisasi kegiatan yang pendanaannya belum diperhitungkan secara memadai dalam rencana penarikan dana. Hal ini menyebabkan nilai penyerapan anggaran menjadi kurang optimal. Kendala ini menunjukkan perlunya penyeselarasan lebih baik antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar penarikan dana dapat dilakukan secara tepat waktu, sehingga mendukung optimalisasi pelaksanaan anggaran secara keseluruhan.

Realisasi anggaran 2024 sebesar Rp3.259.308.582 (84,77%) dari total DIPA sebesar Rp3.844.764.000

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, langkah-langkah berikut telah dilakukan:

1. Penyesuaian Rencana Penarikan Dana Rencana penarikan dana telah disesuaikan dengan realisasi kegiatan yang tercatat dalam Aplikasi SAKTI. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan kebutuhan aktual kegiatan yang telah dilaksanakan.
2. Penyesuaian Pembayaran Kegiatan Kegiatan yang dapat diakomodasi

pembayarannya telah disesuaikan agar selaras dengan rencana penarikan dana yang telah disusun. Upaya ini dilakukan untuk menjaga efisiensi dan memastikan optimalisasi penyerapan anggaran sesuai target yang telah ditetapkan.

Untuk memastikan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dapat optimal, dilakukan langkah penyeselarasan antara perencanaan anggaran dan rencana kerja kegiatan pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2024. Penyeselarasan ini bertujuan untuk memastikan alokasi anggaran mencerminkan kebutuhan riil kegiatan sehingga penyerapan dana berjalan efektif, efisien, dan sesuai target yang telah ditetapkan.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase capaian realisasi pokok lelang pada KPKNL Serang menunjukkan tren kinerja yang positif dan berkelanjutan. Pada tahun 2021, realisasi pokok lelang tercatat sebesar 89,83%, yang kemudian mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022 hingga mencapai 120,00%.

Pada tahun 2023, capaian realisasi tetap berada di atas target dengan persentase sebesar 103,49%, dan kembali meningkat pada tahun

2024 menjadi 105,76%. Puncak kinerja dalam periode tersebut terjadi pada tahun 2025, dengan persentase realisasi sebesar 140,80%, yang berdasarkan ketentuan penilaian kinerja menghasilkan nilai capaian maksimal IKU sebesar 120,00%.

Secara keseluruhan, tren tersebut mencerminkan konsistensi peningkatan efektivitas penyelenggaraan lelang, optimalisasi potensi pasar, serta meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan

D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Realisasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp2.604.578.054,00 (86,77%) dari total DIPA sebesar Rp3.025.837.000,00 yang menghasilkan output lebih besar memperlihatkan efisiensi yang signifikan, disamping bahwa terdapat efisiensi sebesar 11% dari jumlah pemblokiran DIPA yang ditetapkan.

Revisi yang dilaksanakan dengan pengalihan beberapa program yang tidak terserap ke program-program

prioritas mampu menghasilkan output dari 920 item menjadi 1.184 item yang artinya terdapat efisiensi dalam pengelolaan anggaran yang mengacu pada kemampuan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Ini berarti mengurangi pemborosan, baik dalam bentuk pengeluaran yang tidak perlu maupun dalam bentuk alokasi sumber daya yang tidak optimal.

Tabel 45 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

PROGRAM KEGIATAN	SEBELUM REVISI		SESUDAH REVISI	
	Output	Rupiah	Output	Rupiah
Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	15 Orang	Rp53.528.000,00	100	Rp53.528.000,00
Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	24 Orang	Rp50.000.000,00	100	Rp50.000.000,00
Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	3 Orang	Rp10.033.000,00	10	Rp10.033.000,00
Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	80 Surat Keputusan	Rp102.500.000,00	80	Rp89.772.000,00
Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	21 Surat Keputusan	Rp55.000.000,00	21	Rp55.000.000,00
Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	265 rekomendasi kebijakan	Rp26.816.000,00	265	Rp20.304.000,00
Risalah Lelang	350 Dokumen	Rp19.906.000,00	350	Rp19.906.000,00

PROGRAM KEGIATAN	SEBELUM REVISI		SESUDAH REVISI	
	Output	Rupiah	Output	Rupiah
Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan[Program Baru - Perubahan Kebijakan	1 rekomendasi	Rp8.320.000,00	1	Rp8.320.000,00
Rekomendasi Hasil Penilaian	2 rekomendasi	Rp16.800.000,00	2	Rp16.800.000,00
Penggalian Potensi Lelang	1 rekomendasi	Rp13.078.000,00	1	Rp7.978.000,00
Aset BUN yang Dikelola	35 Aset	Rp310.654.000,00	35	Rp298.631.000,00
Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PN)	5 rekomendasi	Rp9.961.000,00	101	Rp9.961.000,00
Layanan Bantuan Hukum	25 Layanan	Rp65.000.000,00	25	Rp58.783.000,00
Layanan Perkantoran	12 Layanan	Rp1.973.623.000,00	12	Rp2.023.623.000,00
Kerumahtanggaan	12 Layanan	Rp100.197.000,00	12	Rp100.197.000,00
Peralatan Fasilitas Perkantoran	5 Unit	Rp40.016.000,00	5	Rp80.032.000,00
Kendaraan Bermotor	2 Unit	Rp56.000.000,00	2	Rp56.000.000,00
Pembinaan/Edukasi Publik	35 Orang	Rp3.525.000,00	35	Rp3.525.000,00
Kehumasan	20 Kegiatan	Rp7.779.000,00	20	Rp7.779.000,00
Pameran/Eksibisi	2 Kegiatan	Rp35.081.000,00	2	Rp35.081.000,00
Rekomendasi Kepatuhan Internal	5 Dokumen	Rp20.584.000,00	5	Rp20.584.000,00
TOTAL		Rp2.978.401.000,00	TOTAL	Rp3.025.837.000,00

E. Kinerja Lain-lain

1. Penghargaan

Setelah meraih predikat Zona Integritas -Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2023, kemudian pada tahun 2025 KPKNL Berhasil lolos dalam Monev WBK dengan nilai yang sangat memuaskan.

Kualitas komitmen kerja KPKNL Serang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mendapatkan berbagai apresiasi dari berbagai pihak sepanjang tahun 2025. Berikut adalah penghargaan-penghargaan yang diterima oleh KPKNL Serang Tahun 2025, antara lain:

Tabel 46 Apresiasi

No	Bidang	Kategori/Nominasi	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	Bidang PKN	Capaian Persentase Realisasi PNBPN dari Pengelolaan Kekayaan Negara Tertinggi	KPKNL Serang	Kanwil DJKN Banten, Kementerian Keuangan
2	Bidang PN	Perolehan PNBPN Piutang Negara Tertinggi Semester I Tahun 2025	KPKNL Serang	Kanwil DJKN Banten, Kementerian Keuangan
3	Bidang PN	KPKNL tercepat dalam pencapaian kinerja Rekonsiliasi data Piutang Negara Semester II Tahun 2025	KPKNL Serang	Kanwil DJKN Banten, Kementerian Keuangan
4	Bidang Penilaian	Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah (PFPP) "TERPRODUKTIF" (Henri Ristanto)	KPKNL Serang	Kanwil DJKN Banten, Kementerian Keuangan
5	Bidang Lelang	Pokok Lelang Tertinggi Semester I Tahun 2025	KPKNL Serang	Kanwil DJKN Banten, Kementerian Keuangan
6	Bidang Lelang	Pokok Lelang Tertinggi II Tahun 2025	KPKNL Serang	Kanwil DJKN Banten, Kementerian Keuangan
7	Bidang Lelang	PNPB Lelang Tertinggi II Tahun 2025	KPKNL Serang	Kanwil DJKN Banten, Kementerian Keuangan
8	Bidang Lelang	Pelelang dengan Pokok Lelang Tertinggi II Tahun 2025	Budi Purwanto (KPKNL Serang)	Kanwil DJKN Banten, Kementerian Keuangan
9	Bidang Lelang	Pelelang dengan Produktivitas Lelang Tertinggi II Tahun 2025	April Mopsan Hutabarat (KPKNL Serang)	Kanwil DJKN Banten, Kementerian Keuangan
10	Bidang KIH	Nilai Kinerja Organisasi Terbaik	KPKNL Serang	Kanwil DJKN Banten, Kementerian Keuangan
11	Bidang KIH	Pengelola Kinerja Organisasi dan Risiko Terbaik	KPKNL Serang	Kanwil DJKN Banten, Kementerian Keuangan

Gambar 5 Piagam Apresiasi KPKNL Serang Tahun 2025



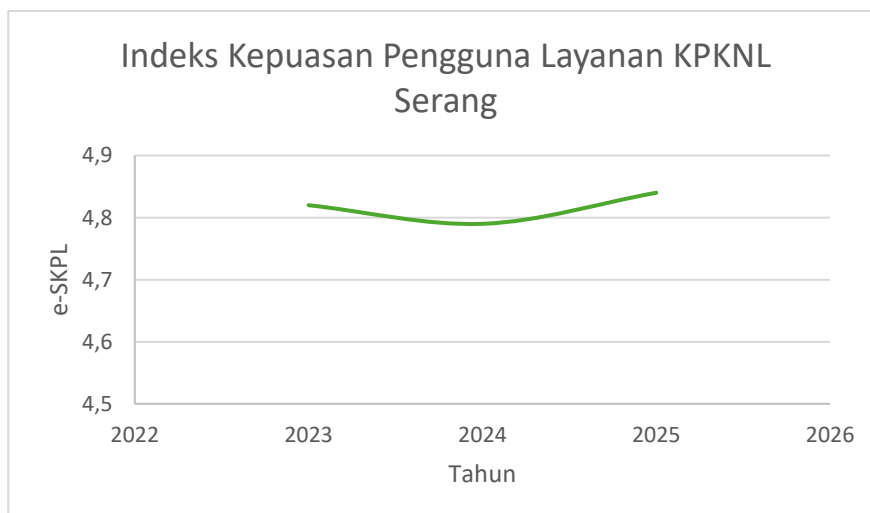
F. Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Peningkatan akuntabilitas kinerja KPKNL Serang tercermin dari perolehan PNBP yang dihasilkan oleh KPKNL Serang.

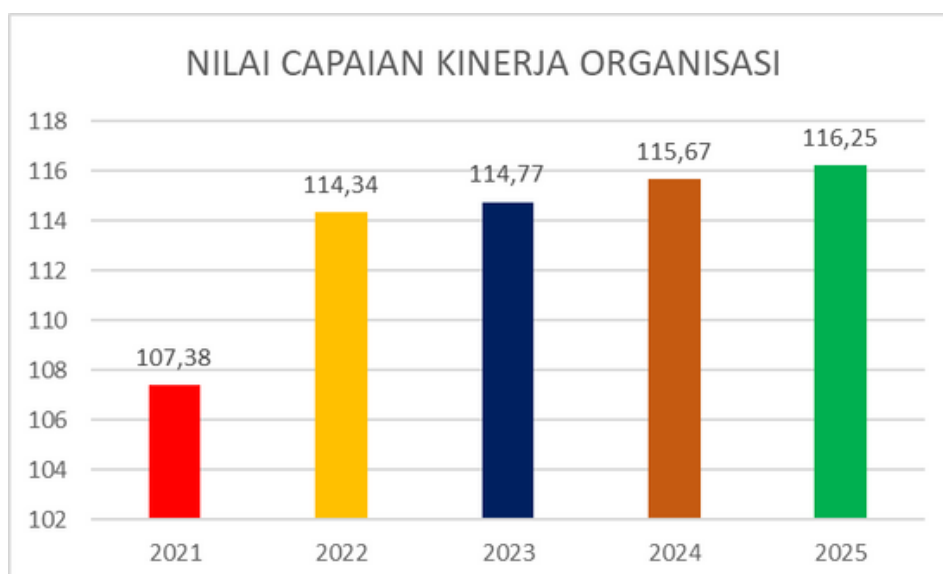
Di samping itu, grafik yang menggambarkan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dapat menjadi acuan

yang menggambarkan peningkatan akuntabilitas kinerja KPKNL Serang. Capaian NKO KPKNL Serang tentu saja merepresentasikan akuntabilitas kinerja KPKNL Serang yang mengalami peningkatan secara konsisten.

Grafik 3 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan




Grafik 4 Nilai Capaian Kinerja Organisasi





04.

Penutup



Garis finis bukan sekadar titik akhir, melainkan simpul makna yang merangkum kerja kolektif: kecepatan individu, ketepatan serah-terima, dan kepercayaan yang dijaga di setiap meter lintasan. Di momen terakhir ini, keberhasilan tidak lahir dari satu pelari yang paling kuat, tetapi dari rangkaian keputusan yang konsisten, menjaga ritme, meminimalkan jeda, dan tetap selaras pada tujuan yang sama.



Laporan Kinerja KPKNL Serang tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 dan disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja KPKNL Serang tahun 2024 memuat capaian-capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak kinerja yang dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024. Hal ini sesuai

dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/29/M.PAN/5/2010 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang telah dirumuskan, capaian kinerja KPKNL Serang menunjukkan hasil yang menggembarakan. Dari 11 Sasaran Strategis yang menjadi tanggung jawab KPKNL Serang, sebanyak 19 IKU berhasil memenuhi atau melampaui target yang telah ditetapkan.

Capaian ini mencerminkan komitmen KPKNL Serang dalam memberikan kontribusi nyata terhadap pengelolaan keuangan negara yang optimal dan akuntabel.



Lampiran



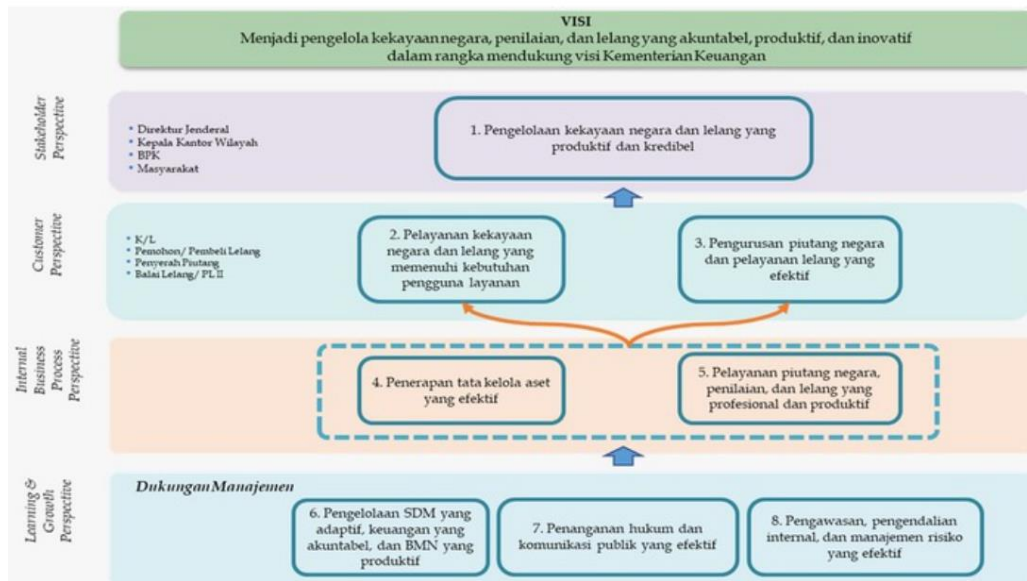


PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-01/WKN.06/2026
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SERANG
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Serang, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SERANG
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	1a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp23,7 M)
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	2a-CP Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100
		2b-N Tingkat efektivitas pembinaan	80%
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	3a-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp325 Jt)
		3b-CP Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp230 M)
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4c-N Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	85%
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	6a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N Indeks pengelolaan kearsipan	80
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks integritas organisasi	100
		8b-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83

Program/Kegiatan 2026

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Kegiatan

Anggaran

Rp636,317,000

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp63,279,000
2. Pengelolaan Aset	Rp573,038,000
Program:	
Dukungan Manajemen	Rp2,010,961,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp65,000,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1,905,962,000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp30,275,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp9,724,000

Serang, Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Banten



Ditandatangani Secara Elektronik
Djanurindro Wibowo

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Serang



Ditandatangani Secara Elektronik
Swastiko Purnomo

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SERANG
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel							
1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp23,7 M)
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan							
2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	5	30	30	60	60	100	100
2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif							
3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp325 Jt)
3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp230 M)
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5c-CP	Persentase produktivitas	30%	40%	40%	75%	75%	85%	85%

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	lelang							
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif							
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	10	25	25	50	50	80	80
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	80	80	80	80	80	80
7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	83	83	83	83	83	83

Serang, Januari 2026

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Serang



Ditandatangani Secara Elektronik
Swastiko Purnomo

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SERANG
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Waktu	Trajectory Kegiatan	Output	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)

Serang, Januari 2026

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang



Ditandatangani Secara Elektronik
Swastiko Purnomo

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN		PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026		
PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Swastiko Purnomo	NAMA	Djanurindro Wibowo	
NIP	19720318 199803 1 003	NIP	19700116 199903 1 001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp23,7 M)	Penerima Layanan
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100	Penerima Layanan
		Tingkat efektivitas pembinaan	80%	Penerima Layanan
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp325 Jt)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp230 M)	Penerima Layanan
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Proses Bisnis
		Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	85%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan kearsipan	80	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks penanganan permasalahan hukum	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	Indeks integritas organisasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	<p>Berorientasi pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	<p>Akuntabel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	<p>Kompeten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	<p>Harmonis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	<p>Loyal</p>	

PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	<p>Adaptif</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	<p>Kolaboratif</p> <ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Serang, Januari 2026

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Swastiko Purnomo
19720318 199803 1 003



Ditandatangani Secara Elektronik
Djanurindro Wibowo
19700116 199903 1 001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

DUKUNGAN SUMBER DAYA

1. 28 pegawai
2. Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp23,7 M)
2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	5	30	30	60	60	100	100
2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp325 Jt)
3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp230 M)

4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	75%	75%	85%	85%
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	10	25	25	50	50	80	80
7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	80	80	80	80	80	80
7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	83	83	83	83	83	83

KONSEKUENSI

- Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Serang, Januari 2026

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Swastiko Purnomo
19720318 199803 1 003

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Djanurindro Wibowo
19700116 199903 1 001

the \mathbb{R}^n is a linear space over \mathbb{R} with the usual addition and scalar multiplication. The inner product is defined by

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n \quad (1)$$

where $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ and $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ are vectors in \mathbb{R}^n .

The norm of a vector x is defined by

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2} \quad (2)$$

The distance between two vectors x and y is defined by

$$d(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2} \quad (3)$$

The angle between two vectors x and y is defined by

$$\cos \theta = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|} \quad (4)$$

The orthogonal projection of a vector x onto a vector y is defined by

$$\text{proj}_y x = \frac{\langle x, y \rangle}{\|y\|^2} y \quad (5)$$

The orthogonal complement of a subspace W is defined by

$$W^\perp = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \langle x, y \rangle = 0 \text{ for all } y \in W\} \quad (6)$$

The orthogonal decomposition theorem states that any vector x in \mathbb{R}^n can be written as the sum of a vector in W and a vector in W^\perp .

The orthogonal basis of a subspace W is a set of vectors in W that are mutually orthogonal and have unit length.

The Gram-Schmidt process is a method for constructing an orthogonal basis from a given set of vectors.

The QR decomposition of a matrix A is a factorization of A into the product of an orthogonal matrix Q and an upper triangular matrix R .

The least squares solution of a system of linear equations $Ax = b$ is the vector x that minimizes the norm of the residual vector $r = b - Ax$.

The singular value decomposition (SVD) of a matrix A is a factorization of A into the product of three matrices: an orthogonal matrix U , a diagonal matrix Σ , and another orthogonal matrix V .

The principal component analysis (PCA) is a statistical technique for reducing the dimensionality of a dataset.

The Fourier transform is a mathematical operation that decomposes a function of time into its constituent frequencies.



KEMENTERIAN KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA